



KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 823 TAHUN 2023

TENTANG

APLIKASI UMUM BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 834);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG APLIKASI UMUM BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah.

- KEDUA : Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku secara nasional.
- KETIGA : Penyelenggaraan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- KEEMPAT : Pembinaan penerapan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah pada unsur:
- a. proses bisnis dan data dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
  - b. teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- KELIMA : Kepala daerah menerapkan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di lingkungan pemerintah daerah masing-masing.
- KEENAM : Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 823 TAHUN 2023  
TENTANG APLIKASI UMUM BIDANG  
PEMERINTAHAN DAERAH

PERSYARATAN APLIKASI UMUM BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga perlu diarahkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya pencegahan korupsi yang lebih optimal di pemerintah daerah sebagaimana maksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Memperhatikan amanat dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah, dimana untuk pengelolaan informasi tersebut dilakukan pada suatu sistem

informasi pemerintahan daerah. Lebih lanjut pada Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Memperhatikan amanat kebijakan tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sebuah *tools* pengelolaan informasi pemerintahan daerah.

Terdapat tiga informasi pemerintahan daerah di SIPD yaitu informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Informasi pembangunan daerah meliputi data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, informasi perencanaan pembangunan daerah. Informasi keuangan daerah meliputi informasi perencanaan anggaran daerah, informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah lainnya. Informasi pemerintahan daerah lainnya meliputi informasi LPPD, Informasi EPPD, informasi perda, informasi binwa/audit dan informasi lainnya yang terkait dengan pemerintahan daerah.

SIPD dibangun untuk menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, memiliki alur proses lengkap (prinsip manajemen) menggunakan kodifikasi sebagai basis data, terintegrasi dan efektif dan efisien. Urgensi penerapan SIPD adalah penyelenggaraan pemerintah yang semakin dinamis, sehingga dibutuhkan suatu sistem informasi untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (binwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan sebagai salah satu bentuk *Open Government Indonesia* (GOI), perubahan pola kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk adaptasi dalam menjawab tuntutan revolusi industri 4.0, tingginya belanja teknologi informasi yang belum saling terhubung (*silo based system*) sehingga tidak efisien dan efektif, akibatnya aplikasi perencanaan dan keuangan

bervariasi yang menjadikan tidak semua aplikasi memiliki alur proses sesuai dengan regulasi terkini dan sebagian besar aplikasi hanya dipergunakan sebagai alat untuk menyusun laporan spesifik, di samping itu, kodefikasi program dan kegiatan di daerah yang masih memiliki banyak variasi sehingga cukup sulit dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur bahwa layanan yang mendukung kegiatan di bidang pemerintahan daerah merupakan salah satu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Dengan demikian, SIPD sebagai aplikasi yang memfasilitasi bidang pemerintahan daerah dan digunakan oleh seluruh pemerintah daerah, dapat ditetapkan sebagai Aplikasi Umum. Aplikasi Umum SIPD diharapkan dapat meningkatkan, mendorong, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbuka, partisipatif, inovatif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan khususnya di bidang pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan bersama.

## B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Aplikasi Umum Bidang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini dimaksudkan sebagai dasar acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sedangkan tujuan Aplikasi Umum Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah:

1. Mewujudkan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik;
3. Mewujudkan keseragaman dan keterpaduan pengelolaan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik; dan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, memiliki alur proses lengkap (prinsip manajemen) menggunakan kodefikasi sebagai basis data, terintegrasi dan efektif dan efisien.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup persyaratan Aplikasi Umum Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dibatasi pada:

1. Pemetaan Referensi Arsitektur SPBE terkait pelaksanaan pemerintahan daerah;
2. Persyaratan proses bisnis;
3. Persyaratan data;
4. Persyaratan teknologi informasi dan komunikasi; dan
5. Persyaratan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### D. Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Peraturan Perundang-Undangan terkait Bidang Perencanaan, Penganggaran Pemerintahan Daerah dan Informasi Daerah Lainnya (Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### E. Pengertian Umum

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
2. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
4. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE yang terintegrasi;
5. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Peta Rencana adalah adalah suatu instrumen yang digunakan untuk perencanaan yang fleksibel dalam mendukung perencanaan strategis dan jangka panjang, dengan mencocokkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang pada solusi.
9. Pengelolaan Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses pengukuran, struktur dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
10. Strategi Pengelolaan Perubahan adalah suatu strategi yang digunakan untuk pengelolaan tim organisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk mencapai perubahan.
11. Pengelolaan Keamanan Informasi adalah digunakan untuk mencapai penerapan keamanan dalam menjaga kerahasiaan, integritas dan kesiediaan informasi.

12. Standar Teknologi adalah sebagai standar yang mendasari teknologi tertentu.
13. Standar Keamanan Informasi adalah sebagai standar yang mendasari keamanan informasi tertentu.
14. Standar Data adalah sebagai standar yang mendasari data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

## BAB II

### PEMETAAN REFERENSI ARSITEKTUR SPBE TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka efektifitas dan optimalisasi proses yang terjadi pada pelaksanaan Pemerintahan Daerah, diperlukan pemetaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam Arsitektur SPBE Nasional. Pemetaan dilakukan terutama pada referensi Arsitektur SPBE Nasional, untuk memastikan terjadinya integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan Pemerintahan Daerah yang terintegrasi. Pemetaan referensi Arsitektur SPBE Nasional dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

#### A. Pemetaan Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Dalam pengelompokan proses bisnis berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, maka layanan ini merupakan luaran dari proses bisnis RAB - Pemerintahan Umum – Dalam Negeri (RAB.09.01). Pengklasifikasian proses bisnis Dalam Negeri terdiri dari proses bisnis Pembinaan Pemerintahan Dalam Negeri (RAB.09.01.01), proses bisnis Otonomi Daerah (RAB.09.01.03), proses bisnis Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (RAB.09.01.05), dan proses bisnis Keuangan Daerah (RAB.09.01.06). Pengklasifikasian proses bisnis ini akan diperjelas dengan tingkat di bawahnya yang didefinisikan pada Bab III Persyaratan Proses Bisnis.

#### B. Pemetaan Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)

Layanan pemerintahan daerah hanya berhasil bila tersedia data dan informasi yang layak dan valid untuk digunakan. Dengan adanya kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), kualitas data yang dihasilkan dapat dijaga dengan baik sehingga mampu melakukan interoperabilitas untuk berbagi pakai data.

Arsitektur data dan informasi pada layanan ini adalah RAD – Informasi Pemerintahan Umum (RAD.09) yang di dalamnya terdapat data dalam negeri (RAD.09.01) yang meliputi data Pembinaan Pemerintahan Dalam Negeri (RAB.09.01.01), data Otonomi Daerah (RAB.09.01.03), data Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (RAB.09.01.05), dan data Keuangan Daerah

(RAB.09.01.06) yang telah disesuaikan dengan Referensi Arsitektur SPBE Domain Data dan Informasi. Pemetaan ini akan diperjelas operasionalisasinya pada Bab IV Persyaratan Data.

#### C. Pemetaan Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL)

Layanan pemerintahan daerah terdiri dari beberapa layanan berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Berikut pemetaan layanan mengacu pada arsitektur layanan SPBE:

1. Layanan perencanaan mengacu pada referensi RAL – Layanan Administrasi Pemerintahan – Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (RAL.02.01.05);
2. Layanan penganggaran mengacu pada referensi RAL – Layanan Administrasi Pemerintahan – Keuangan Daerah (RAL.02.01.06);
3. Layanan penatausahaan mengacu pada referensi RAL – Layanan Administrasi Pemerintahan – Keuangan Daerah (RAL.02.01.06);
4. Layanan akuntansi dan pelaporan mengacu pada referensi RAL – Layanan Administrasi Pemerintahan – Keuangan Daerah (RAL.02.01.06);
5. Layanan pemerintahan daerah lainnya yang meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. Layanan peraturan daerah mengacu pada referensi RAL – Layanan Administrasi Pemerintahan – Otonomi Daerah (RAL.02.01.03);
  - b. Layanan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada referensi RAL – Layanan Administrasi Pemerintahan – Otonomi Daerah (RAL.02.01.03);
  - c. Layanan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada referensi RAL – Layanan Administrasi Pemerintahan – Otonomi Daerah (RAL.02.01.03);
  - d. Layanan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada referensi RAL – Layanan Administrasi Pemerintahan – Pembinaan Pemerintahan Dalam Negeri (RAL.02.01.01);

#### D. Pemetaan Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA)

Layanan pemerintahan daerah ini merupakan keluaran dari sebuah Aplikasi yang dapat dikategorikan menurut Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE sebagai RAA – Aplikasi Umum – Aplikasi Administrasi Pemerintahan (RAA.01.02).

#### E. Pemetaan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI)

Dalam penerapan SPBE, infrastruktur merupakan komponen penting untuk mendukung terlaksananya aplikasi SPBE, pengelolaan data dan informasi, dan operasionalisasi layanan SPBE. Layanan sebagai luaran dari proses bisnis, dihasilkan secara elektronik dari aplikasi SPBE yang terpasang di sebuah server ataupun *cloud*. Sedangkan aplikasi tersebut menggunakan data yang tersimpan dalam media penyimpanan yang aman melalui SPL (Sistem Penghubung Layanan) tertentu. Baik penyelenggara Pemerintah maupun masyarakat umum dapat berinteraksi dengan layanan Pemerintah melalui jaringan intra tersendiri dan jaringan internet.

Beberapa komponen infrastruktur yang terkait untuk menghasilkan layanan pemerintahan daerah antara lain:

1. RAI – Fasilitas Komputasi (RAI.01):
  - a) Pusat Data Nasional (RAI.01.01);
  - b) Pusat Komputasi (RAI.01.02); dan
  - c) Pusat Kendali (RAI.01.03).
2. RAI – Sistem Integrasi (RAI.02):
  - a) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (RAI.02.02); dan
  - b) Jaringan Intra Pemerintah (RAI.02.01).
3. RAI – Platform (RAI.03):
  - a) Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi (RAI.03.01); dan
  - b) Komputasi awan (RAI.03.02).

#### F. Pemetaan Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK)

Data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang berada di layanan pembangunan daerah perlu diamankan agar dapat memberikan layanan secara optimal. Melihat hal tersebut, RAK terkoneksi dengan RAA, RAD dan RAI. Melihat bahwa layanan ini merupakan salah satu Aplikasi Umum yang infrastrukturnya menggunakan Infrastruktur SPBE Nasional maka untuk RAK sebagai berikut:

1. RAK - Standar Keamanan (RAK.01)

Pada standar keamanan yang menjadi persyaratan untuk diterapkan pada data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE layanan tersebut dengan memperhatikan:

- a) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengacu pada referensi arsitektur keamanan SPBE sebagai RAK – Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE (RAK.01.01).

- b) Penerapan Standar Keamanan Internasional mengacu pada referensi arsitektur keamanan SPBE sebagai RAK – Standar Keamanan Internasional (RAK.01.02).
  - c) Penerapan regulasi lainnya terkait Keamanan SPBE mengacu pada referensi arsitektur keamanan SPBE sebagai RAK – Regulasi Lainnya (RAK.01.03).
2. RAK – Penerapan Keamanan (RAK.02)

RAK perlu juga memasukkan kegiatan penerapan keamanan untuk data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE dengan memperhatikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi persyaratan keamanan, yaitu:

- a) Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE (RAK.02.01);
  - b) ITSA (*Information Technology Security Assessment*) mengacu pada referensi arsitektur keamanan SPBE sebagai RAK – Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE (RAK.02.02);
  - c) Rekomendasi dan remediiasi hasil ITSA sebelumnya mengacu pada referensi arsitektur keamanan SPBE sebagai RAK - Peningkatan Keamanan SPBE (RAK.02.03);
  - d) Terbentuknya CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) di Kementerian Dalam Negeri mengacu pada referensi arsitektur keamanan SPBE sebagai RAK - Penanganan Insiden Keamanan SPBE (RAK.02.04); dan
  - e) Audit Keamanan SPBE mengacu pada referensi Arsitektur Keamanan RAK – Audit Keamanan SPBE (02.05).
3. RAK - Kelaikan Keamanan (RAK.03)

Kelaikan keamanan untuk Aplikasi Umum dan infrastruktur SPBE nasional perlu diberikan oleh BSSN, karenanya untuk aplikasi dan infrastruktur pada layanan pemerintahan daerah ini perlu memasukkan:

- a) Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum mengacu pada Arsitektur Keamanan RAK – Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum (03.01); dan

- b) Kelaikan Kemanan Infrastruktur SPBE Nasional mengacu pada Arsitektur Keamanan RAK – Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional (03.02).

Pemetaan ini akan diperjelas operasionalisasinya pada Bab V Persyaratan Keamanan.

BAB III  
PERSYARATAN PROSES BISNIS

Persyaratan proses bisnis Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah merupakan deskripsi proses bisnis yang menjadi syarat pemenuhan terhadap Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah pada pembangunan/pengembangan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah ataupun aplikasi sejenis. Persyaratan proses bisnis Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah mencakup deskripsi peran/aktor pelaksana, kode proses, proses bisnis level 0, proses bisnis level 1, proses bisnis level 2. Proses bisnis digambarkan dengan menggunakan *Business Process Model and Notation (BPMN)*.

A. Deskripsi Aktor Pelaksana

| No | Kode       | Aktor Pelaksana                                                                                                                           | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | KEMENDAGRI | Kementerian Dalam Negeri                                                                                                                  | Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. | BANGDA     | Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri                                                                     | Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Ditjen Bina Pembangunan Daerah bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                          |
| 3. | PEIPD      | Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri | Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah. Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah. |

|     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | KEMENKEU | Kementerian Keuangan                     | Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara                                                                               |
| 5.  | BAPPENAS | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional   | Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.                                                                                  |
| 6.  | BPK      | Badan Pemeriksa Keuangan                 | lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri                                             |
| 7.  | KPK      | Komisi Pemberantasan Korupsi             | lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya |
| 8.  | BPKP     | Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan | Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan                                                                                                                   |
| 9.  | K/L      | Kementerian/ Lembaga                     | Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden                                                                                                                   |
| 10. | DPRD     | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah           | lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah                                                                                                                                               |
| 11, | SEK_SDI  | Sekretariat Satu                         | Pejabat Struktural dan                                                                                                                                                                                                                           |

|     |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            | Data Indonesia                      | Fungsional di lingkungan Sekretariat Satu Data Indonesia. Sekretariat Satu Data Indonesia adalah salah satu unit kerja (ex-officio) di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional (Bappenas)                                                                                          |
| 12. | TP_KSP     | Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta   | Pejabat Struktural dan Fungsional di Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta (KSP). Tim Pelaksana KSP adalah tim yang membantu pelaksanaan Tim Percepatan KSP yang secara administratif berkedudukan di Badan Informasi Geospasial (BIG).                                                                                                                    |
| 13. | FORKOPIMDA | Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah | Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14. | ORMAS      | Organisasi Kemasyarakatan           | Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| 15. | MASY       | Masyarakat                          | Orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16. | PEMDA      | Pemerintah Daerah                   | kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom                                                                                                                                                                                                      |
| 17. | PD         | Perangkat                           | organisasi atau lembaga pada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | Daerah                                                                                                                       | Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah                                                                                                                                  |
| 18. | BAPPEDA   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                             | Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Bappeda. Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau kabupaten/kota.                                                                                                                                                                          |
| 19. | APIP      | Aparat Pengawasan Internal Pemerintah                                                                                        | Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20. | SUPD_NUPD | Unit Kerja yang menangani Urusan Konkuren dan Non Urusan Konkuren Pemerintahan Daerah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan urusan konkuren dan non urusan konkuren pemerintahan daerah, serta melakukan pembinaan, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 21. | TAPD      | Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                                                                               | Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22. | PPK       | Pejabat Penatausahaan Keuangan – SKPD                                                                                        | Pejabat Sekretaris SKPD atau Kasubbag yang mengurus Keuangan, Untuk menjalankan Fungsi Akuntansi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23. | PPKD      | Pejabat Pengelola                                                                                                            | Kepala SKPKD yang mempunyai tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |                 |                                                                            |
|--|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Keuangan Daerah | melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. |
|--|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|

B. Kode Proses

Pada penggambaran proses bisnis, setiap proses diberikan kode proses bisnis sebagai identitas setiap proses yang juga dapat mengidentifikasi tingkatan proses bisnis. Kode proses bisnis direpresentasikan dalam Format [SIPD.TINGKATAN\_PROSES.TINGKATAN\_SUBPROSES] dimana [TINGKATAN.PROSES] berisi relasi antara proses dan subproses serta nomor urut proses.

Berdasarkan ketentuan kode proses tersebut, berikut tabel seluruh daftar kode proses.

| No. | Kode Proses          | Nama Proses                                                             |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | DAB28-09.01.04       | Mengelola Informasi Pembangunan Daerah                                  |
| 2.  | DAB28-09.01.04.01    | Mengelola Data Perencanaan Pembangunan Daerah                           |
| 3.  | DAB28-09.01.04.01.01 | Mengelola Data Hasil Evaluasi Kinerja Daerah                            |
| 4.  | DAB28-09.01.04.01.02 | Mengelola Data Gambaran Umum Kondisi Daerah                             |
| 5.  | DAB28-09.01.04.01.03 | Mengelola Informasi Kerangka Ekonomi dan Kapasitas Riil Keuangan Daerah |
| 6.  | DAB28-09.01.04.02    | Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                         |
| 7.  | DAB28-09.01.04.02.01 | Menyusun RPJPD/Perubahan RPJPD                                          |
| 8.  | DAB28-09.01.04.02.02 | Menyusun RPJMD/Perubahan RPJMD                                          |
| 9.  | DAB28-09.01.04.02.03 | Menyusun RKPD                                                           |
| 10. | DAB28-09.01.04.02.04 | Menyusun Perubahan RKPD                                                 |
| 11. | DAB28-09.01.04.02.05 | Menyusun Dokumen Perencanaan dalam Kondisi Tertentu                     |
| 12. | DAB28-09.01.04.03    | Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           |
| 13. | DAB28-09.01.04.03.01 | Menyusun Renstra PD dan Perubahan Renstra PD                            |

|     |                      |                                                                   |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 14. | DAB28-09.01.04.03.02 | Menyusun Renja PD                                                 |
| 15. | DAB28-09.01.04.03.03 | Menyusun Perubahan Renja PD                                       |
| 16. | DAB28-09.01.04.04    | Melakukan Analisis dan Profil Pembangunan Daerah                  |
| 17. | DAB28-09.01.04.04.01 | Mengelola Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                |
| 18. | DAB28-09.01.04.04.02 | Melakukan Analisis Pembangunan Daerah                             |
| 19. | DAB28-09.01.04.04.03 | Menyusun Profil Pembangunan Daerah                                |
| 20. | DAB28-09.01.05       | Mengelola Informasi Keuangan Daerah                               |
| 21. | DAB28-09.01.05.01    | Mengelola Informasi Perencanaan Anggaran Daerah                   |
| 22. | DAB28-09.01.05.01.01 | Menyusun KUA                                                      |
| 23. | DAB28-90.01.05.01.02 | Menyusun PPAS                                                     |
| 24. | DAB28-90.01.05.01.03 | Menyusun Rancangan APBD                                           |
| 25. | DAB28-90.01.05.01.04 | Menetapkan APBD                                                   |
| 26. | DAB28-90.01.05.01.05 | Melakukan Pergeseran Anggaran                                     |
| 27. | DAB28-90.01.05.01.06 | Menyusun Perubahan KUA                                            |
| 28. | DAB28-90.01.05.01.07 | Menyusun Perubahan PPAS                                           |
| 29. | DAB28-90.01.05.01.08 | Menyusun Rancangan Perubahan APBD                                 |
| 30. | DAB28-90.01.05.01.09 | Menetapkan Perubahan APBD                                         |
| 31. | DAB28-90.01.05.02    | Mengelola Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah |
| 32. | DAB28-90.01.05.02.01 | Menyusun DPA SKPD dan AKPD                                        |
| 33. | DAB28-90.01.05.02.02 | Melakukan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah         |
| 34. | DAB28-90.01.05.02.03 | Melakukan Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah            |
| 35. | DAB28-90.01.05.02.04 | Melakukan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah         |
| 37. | DAB28-90.01.05.03    | Mengelola Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah       |
| 38. | DAB28-90.01.05.03.01 | Mengelola Informasi Akuntansi Belanja Daerah                      |

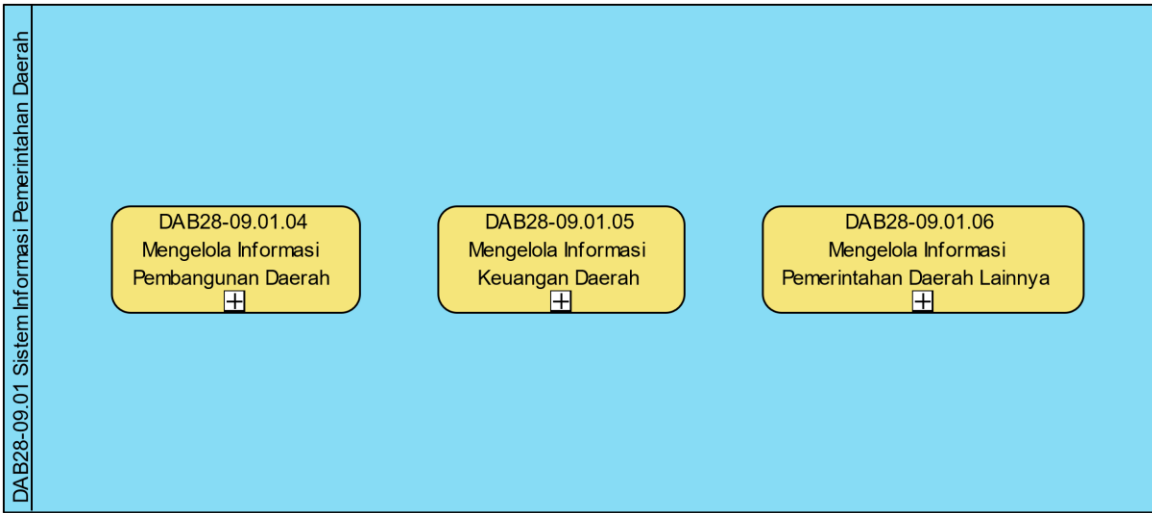
|     |                      |                                                                    |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 39. | DAB28-90.01.05.03.02 | Mengelola Informasi Akuntansi Belanja Daerah                       |
| 40. | DAB28-90.01.05.03.03 | Mengelola Informasi Akuntansi Pembiayaan Daerah                    |
| 41. | DAB28-90.01.05.03.04 | Mengelola Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah             |
| 42. | DAB28-90.01.05.04    | Mengelola Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah |
| 43. | DAB28-90.01.05.04.01 | Melakukan Reviu Laporan APBD                                       |
| 44. | DAB28-90.01.05.04.02 | Memeriksa Laporan Keuangan Daerah                                  |
| 45. | DAB28-90.01.05.04.03 | Menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah            |
| 46. | DAB28-09.01.06       | Mengelola Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya                    |
| 47. | DAB28-09.01.06.01    | Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah               |
| 48. | DAB28-09.01.06.01.01 | Mengumpulkan Data dan Dokumen Pendukung                            |
| 49. | DAB28-09.01.06.01.02 | Menyusun Dokumen dan Data Dasar Capaian Kinerja                    |
| 50. | DAB28-09.01.06.01.03 | Verifikasi dan Penilaian Dokumen dan Data Dasar Capaian Kinerja    |
| 51. | DAB28-09.01.06.01.04 | Menyusun dan Menyampaikan LPPD                                     |
| 52. | DAB28-09.01.06.01.05 | Menyusun dan Menyampaikan LKPJ                                     |
| 53. | DAB28-09.01.06.01.06 | Menyusun dan Menyampaikan RLPPD                                    |
| 54. | DAB28-09.01.06.02    | Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah          |
| 55. | DAB28-09.01.06.02.01 | Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi          |
| 56. | DAB28-09.01.06.02.02 | Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota    |
| 57. | DAB28-09.01.06.02.03 | Menyampaikan Hasil Evaluasi                                        |
| 58. | DAB28-09.01.06.02.04 | Menindaklanjuti Hasil Evaluasi                                     |

C. Proses Bisnis Level 0-DAB28-09.01 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis level 0-DAB28-09.01 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini meliputi:

- 1. DAB28-09.01.04 Mengelola Informasi Pembangunan Daerah
- 2. DAB28-09.01.05 Mengelola Informasi Keuangan Daerah
- 3. DAB28-09.01.06 Mengelola Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

Alur pada Proses Bisnis Level 0-DAB28-09.01 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Bisnis Level 0-DAB28-09.01 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses bisnis level 0 DAB28-09.01 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terdiri atas:

Kode Proses DAB28-09.01.04

|             |                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Mengelola Informasi Pembangunan Daerah                                                                                                                                                    |
| Deskripsi   | Pengelolaan informasi yang memuat (a) data perencanaan pembangunan daerah, (b) informasi perencanaan pembangunan daerah, serta (c) analisis dan profil pembangunan daerah                 |
| Input       | 1. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)<br>2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)<br>3. Data spasial<br>4. Informasi perencanaan pembangunan daerah |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>5. Data KLHS</li><li>6. Data kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah</li><li>7. Data keuangan daerah</li></ul>                                                                                                                                                                              |
| Output | <ul style="list-style-type: none"><li>1. RPJPD</li><li>2. Perubahan RPJPD</li><li>3. RPJMD</li><li>4. Perubahan RPJMD</li><li>5. RKPD</li><li>6. Perubahan RKPD</li><li>7. Renstra PD,</li><li>8. Perubahan Renstra PD</li><li>9. Renja PD</li><li>10. Perubahan Renja PD</li><li>11. Hasil Analisis dan Profil Pembangunan Daerah</li></ul> |

Kode Proses DAB28-09.01.05

|             |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah                                                                                                                                                               |
| Deskripsi   | Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. |
| Input       | <ul style="list-style-type: none"><li>1. RKPD</li><li>2. Renja PD</li><li>3. Perubahan RKPD</li><li>4. Perubahan Renja PD</li></ul>                                                                 |
| Output      | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Informasi Penganggaran</li><li>2. Informasi Pelaksanaan Anggaran</li><li>3. Laporan Keuangan</li></ul>                                                     |

Kode Proses DAB28-09.01.06

|             |                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Pengelolaan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya                                                                   |
| Deskripsi   | Pengelolaan data dan informasi pemerintahan daerah selain data dan informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah |

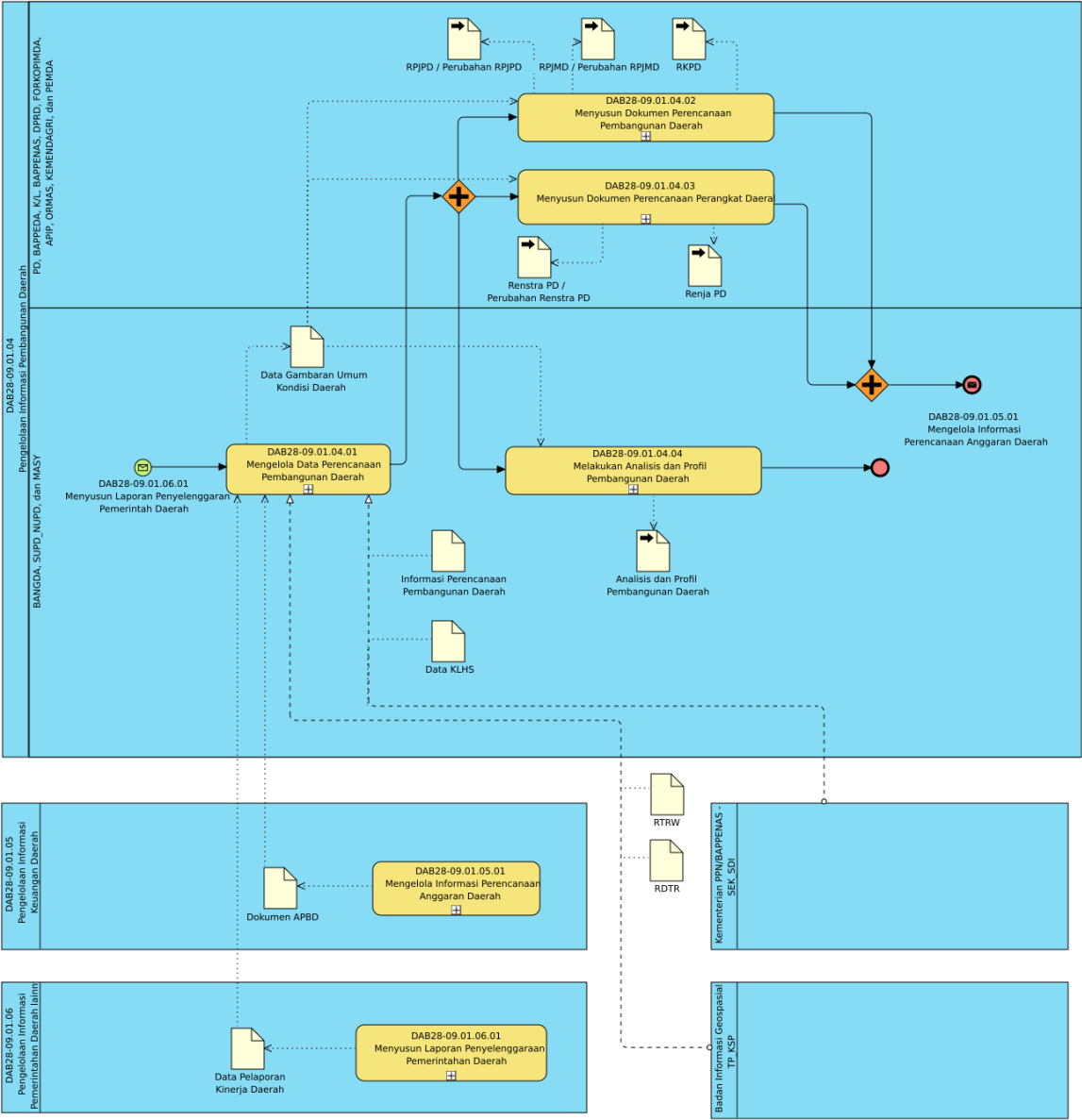
|        |                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input  | 1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:<br>2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan<br>3. Laporan penerapan SPM  |
| Output | 1. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)<br>2. Dokumen Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) |

D. Proses Bisnis Level 1-DAB28-09.01.04 Mengelola Informasi Pembangunan Daerah

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis level 1-DAB28-09.01.04 Mengelola Informasi Pembangunan Daerah ini meliputi:

1. DAB28-09.01.04.01 Mengelola Data Perencanaan Pembangunan Daerah
2. DAB28-09.01.04.02 Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
3. DAB28-09.01.04.03 Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4. DAB28-09.01.04.04 Melakukan Analisis dan Profil Pembangunan Daerah

Alur pada proses bisnis level 1-DAB28-09.01.04 Mengelola Informasi Pembangunan Daerah dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Proses Bisnis Level 1-DAB28-09.01.04 Mengelola Informasi Pembangunan Daerah

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses bisnis level 1 DAB28-09.01.04 Mengelola Informasi Pembangunan Daerah terdiri atas:

Kode Proses DAB 28-09.01.04.01

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Mengelola Data Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deskripsi   | <p>Proses pengelolaan data hasil evaluasi pemerintah daerah, data kerangka ekonomi dan keuangan daerah dan data gambaran umum kondisi daerah.</p> <p>Tahapan pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah terdiri atas tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebaran data.</p> |
| Input       | <p>1. Data spasial:</p> <p>a. RTRW</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>b. RDTR</p> <p>2. Informasi perencanaan pembangunan daerah:</p> <p>3. Data KLHS</p> <p>4. Dokumen Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)</p> <p>5. Informasi Penganggaran</p> <p>6. Informasi Pelaksanaan Anggaran</p> <p>7. Laporan Keuangan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Output | <p>Data Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri atas:</p> <p>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (<i>output</i>) Sub Kegiatan.</p> <p>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (<i>outcome</i>) Urusan/Lintas Urusan.</p> <p>3. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (<i>benefit/impact</i>) indikator sasaran dan sasaran pokok.</p> <p>4. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</p> <p>5. Informasi PDRB dan perkiraan ke depan.</p> <p>6. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</p> <p>7. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran ke depan.</p> <p>8. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</p> <p>9. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</p> <p>10. Informasi Tujuan, Kegiatan Rencana Struktur Ruang, Kegiatan Rencana Pola Ruang pada RDTR</p> <p>11. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</p> |

|  |                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kode Proses DAB28-09.01.04.02

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Deskripsi   | <p>Proses dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Proses penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun (RPJPD) dan penyusunan dokumen perubahan RPJPD, terdiri atas tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, musrenbang, rancangan akhir, dan penetapan.</li><li>2. Proses penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun (RPJMD) dan penyusunan dokumen perubahan RPJMD terdiri atas tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, musrenbang, rancangan akhir, dan penetapan</li><li>3. Proses penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun (RKPD )terdiri atas tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, musrenbang, rancangan akhir, dan penetapan</li><li>4. Proses penyusunan dokumen perubahan RKPD, apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, terdiri atas tahapan penyusunan rancangan, rancangan akhir, dan penetapan</li><li>5. Proses penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kondisi tertentu, seperti RPD/ Perubahan RPD, dilakukan apabila terjadi kondisi tertentu, terdiri atas tahapan rancangan, forum konsultasi publik, rancangan akhir, dan penetapan</li></ol> |
| Input       | Data Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri atas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (output) Sub Kegiatan.</li><li>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.</li><li>3. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.</li><li>4. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</li><li>5. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</li><li>6. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</li><li>7. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</li><li>8. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</li><li>9. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</li><li>10. Informasi Tujuan, Kegiatan Rencana Struktur Ruang, Kegiatan Rencana Pola Ruang pada RDTR</li><li>11. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</li><li>12. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</li></ol> |
| Output | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Target indikator sasaran pokok RPJPD</li><li>2. Target indikator sasaran pokok Perubahan RPJPD</li><li>3. Target program RPJMD</li><li>4. Target program Perubahan RPJMD</li><li>5. Target sub Kegiatan RKPD</li><li>6. Target sub Kegiatan Perubahan RKPD</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 7. Data Tahapan sub Kegiatan RKPD<br>8. Data Tahapan sub Kegiatan Perubahan RKPD<br>9. Target program dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kondisi tertentu |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kode Proses DAB28-09.01.04.03

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deskripsi   | <p>Proses dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun (Renstra PD) dan penyusunan dokumen Perubahan PD, terdiri atas tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, rancangan akhir, dan penetapan</li><li>2. Proses Penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun (Renja PD), terdiri atas tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, rancangan akhir, dan penetapan</li><li>3. Proses Penyusunan dokumen Perubahan Renja PD, apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, terdiri atas tahapan penyusunan rancangan, rancangan akhir, dan penetapan</li></ol> |
| Input       | <p>Data Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (output) Sub Kegiatan.</li><li>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.</li><li>4. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</li><li>5. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</li><li>6. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</li><li>7. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</li><li>8. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</li><li>9. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</li><li>10. Informasi Tujuan, Kegiatan Rencana Struktur Ruang, Kegiatan Rencana Pola Ruang pada RDTR</li><li>11. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</li><li>12. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</li></ol> |
| Output | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Target sub kegiatan Renstra PD</li><li>2. Target sub kegiatan Perubahan Renstra PD</li><li>3. Target sub kegiatan Renja PD</li><li>4. Target sub kegiatan Perubahan Renja PD</li><li>5. Data Tahapan sub Kegiatan Renja PD</li><li>6. Data Tahapan sub Kegiatan Perubahan Renja PD</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Kode Proses DAB28-09.01.04.04

|             |                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Melakukan Analisis dan Profil Pembangunan Daerah                                                                                                 |
| Deskripsi   | Proses analisis yang dilakukan pemerintah terhadap data perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan profil daerah, dan menjadi dasar dalam |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | memperbaharui data, serta informasi perencanaan pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Input  | <p>Data Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (output) Sub Kegiatan.</li><li>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.</li><li>3. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.</li><li>4. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</li><li>5. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</li><li>6. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</li><li>7. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</li><li>8. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</li><li>9. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</li><li>10. Informasi Tujuan, Kegiatan Rencana Struktur Ruang, Kegiatan Rencana Pola Ruang pada RDTR</li><li>11. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</li><li>12. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</li></ol> |
| Output | Hasil analisis dan profil pembangunan daerah, meliputi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

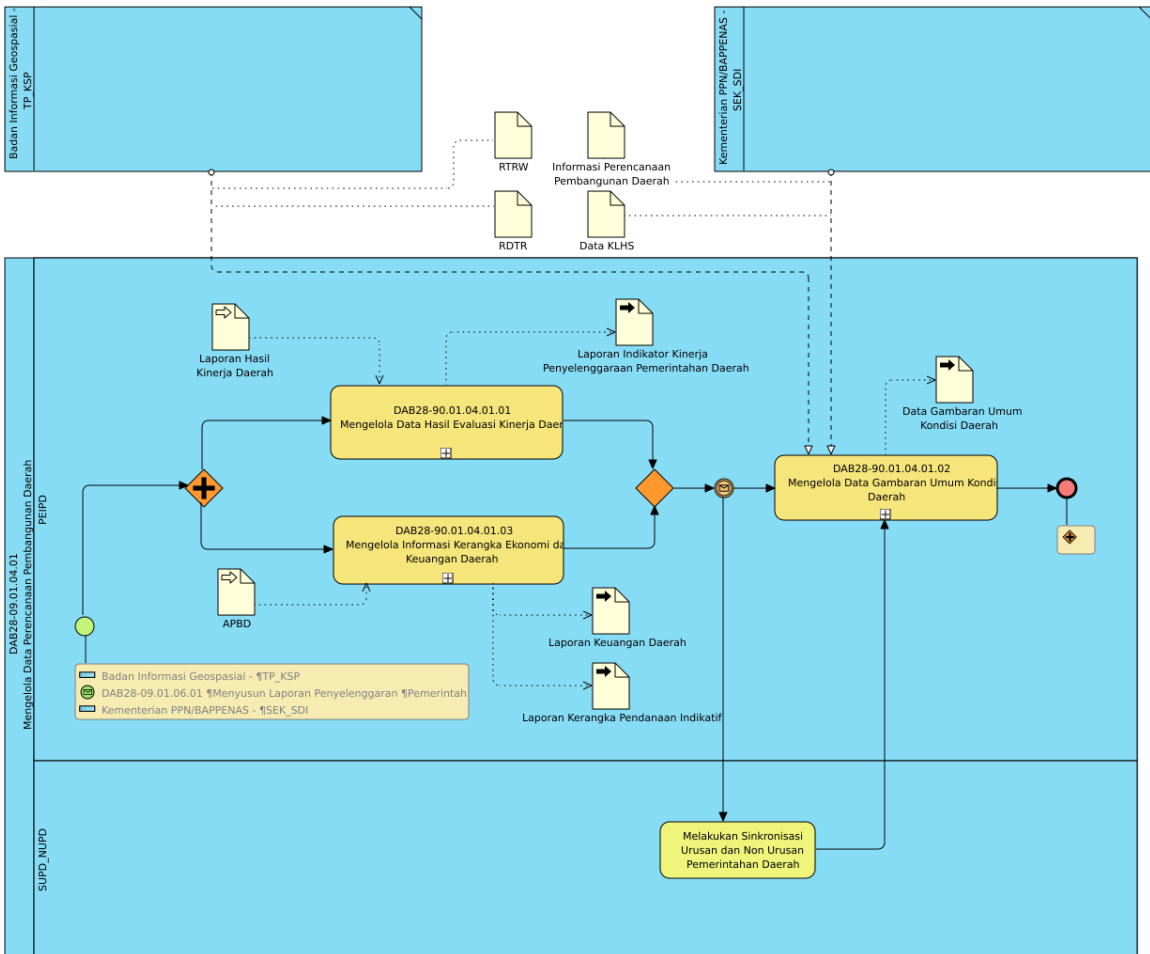
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kondisi geografis daerah</li><li>2. Demografi</li><li>3. Potensi sumber daya daerah</li><li>4. Ekonomi dan keuangan daerah</li><li>5. Aspek kesejahteraan masyarakat</li><li>6. Aspek pelayanan umum</li><li>7. Aspek daya saing daerah</li></ol> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

E. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.04.01 Mengelola Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis level 2-DAB28-09.01.04.01 Mengelola Data Perencanaan Pembangunan Daerah ini meliputi:

1. DAB28-09.01.04.01.01 Mengelola Data Hasil Evaluasi Kinerja Daerah
2. DAB28-09.01.04.01.02 Mengelola Data Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. DAB28-09.01.04.01.03 Mengelola Informasi Kerangka Ekonomi dan Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Alur pada proses bisnis level 2-DAB28-09.01.04.01 Mengelola Data Perencanaan Pembangunan Daerah dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 3. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.04.01 Mengelola Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses bisnis level 2-DAB28-09.01.04.01 Mengelola Data Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

Kode Proses DAB28-09.01.04.01.01

|             |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Mengelola Data Hasil Evaluasi Kinerja Daerah                                                                                                                                                                                  |
| Deskripsi   | Proses evaluasi pemerintah daerah yang berupa capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/urusan/sasaran pemerintahan daerah sehubungan dengan target pembangunan dan penggunaan sumber daya pembangunan |
| Input       | 1. Dokumen Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)<br>2. Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)                                                                                                              |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Output | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (output) Sub Kegiatan</li><li>2. Data hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan</li><li>3. Data hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok</li></ol> |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kode Proses DAB28-09.01.04.01.02

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Mengelola Data Gambaran Umum Kondisi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deskripsi   | Proses pengelolaan gambaran umum kondisi daerah yang berupa rumusan hasil telaahan dan evaluasi yang selaras dengan penyelenggaraan pembangunan Daerah. Gambaran umum kondisi Daerah disusun berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Input       | <p>Data Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (output) Sub Kegiatan.</li><li>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.</li><li>3. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.</li><li>4. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</li><li>5. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</li><li>6. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</li><li>7. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</li></ol> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>8. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</p> <p>9. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</p> <p>10. Informasi Tujuan, Kegiatan Rencana Struktur Ruang, Kegiatan Rencana Pola Ruang pada RDTR</p> <p>11. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</p> <p>12. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</p> |
| Output | Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Kode Proses DAB28-09.01.04.01.03

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Mengelola Informasi Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Deskripsi   | Proses pengelolaan kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang berupa penjelasan terkait kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, serta penjelasan terkait sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah |
| Input       | <p>1. Informasi Penganggaran</p> <p>2. Informasi Pelaksanaan Anggaran</p> <p>3. Laporan Keuangan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Output      | 1. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

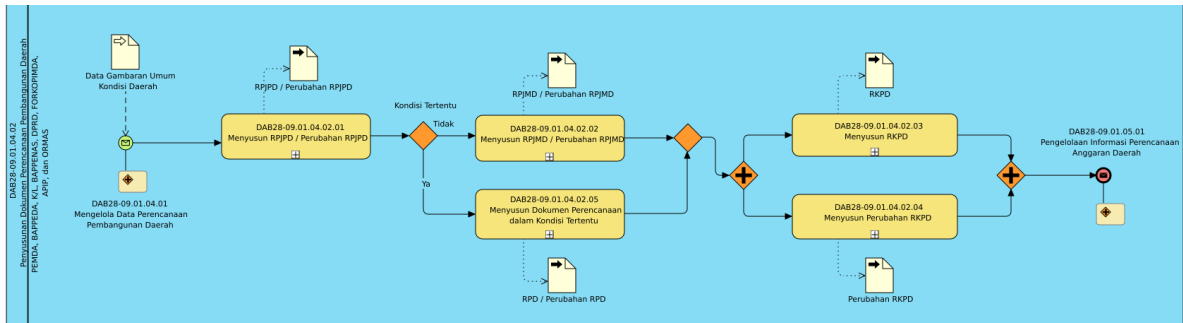
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>2. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan</div> <div>3. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan</div> <div>4. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan</div> <div>5. Informasi Laporan Keuangan Daerah dan perkiraan belanja dan pembiayaan daerah kedepan</div> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

F. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.04.02 Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis level 2-DAB28-09.01.04.02 Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini meliputi:

1. DAB28-09.01.04.02.01 Menyusun RPJPD/Perubahan RPJPD
2. DAB28-09.01.04.02.02 Menyusun RPJMD/Perubahan RPJMD
3. DAB28-09.01.04.02.03 Menyusun RKPD
4. DAB28-09.01.04.02.04 Menyusun Perubahan RKPD
5. DAB28-09.01.04.02.05 Menyusun Dokumen Perencanaan dalam Kondisi Tertentu

Alur pada proses bisnis level 2-DAB28-09.01.04.02 Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 4. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.04.02 Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses bisnis level 2-DAB28-09.01.04.02 Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

Kode Proses DAB28-09.01.04.02.01

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun RPJPD/Perubahan RPJPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Deskripsi   | Proses penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun (RPJPD) dan penyusunan dokumen perubahan RPJPD, terdiri atas tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, musrenbang, rancangan akhir, dan penetapan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Input       | <p>Data Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.</li><li>2. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</li><li>3. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</li><li>4. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</li><li>5. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</li><li>6. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</li><li>7. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</li><li>8. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</li><li>9. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</li></ol> |
| Output      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Target indikator sasaran pokok RPJPD</li><li>2. Target indikator sasaran pokok Perubahan RPJPD</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Kode Proses DAB28-09.01.04.02.02

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun RPJMD/Perubahan RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Deskripsi   | Proses penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun (RPJMD) dan penyusunan dokumen perubahan RPJMD terdiri atas tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, musrenbang, rancangan akhir, dan penetapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Input       | <p>Data Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.</li><li>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.</li><li>3. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</li><li>4. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</li><li>5. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</li><li>6. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</li><li>7. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</li><li>8. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</li><li>9. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</li><li>10. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</li></ol> |
| Output      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Target program RPJMD</li><li>2. Target program Perubahan RPJMD</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Kode Proses DAB28-09.01.04.02.03

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun RKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Deskripsi   | Proses penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun (RKPD), terdiri atas tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, musrenbang, rancangan akhir, dan penetapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Input       | <p>Data Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (output) Sub Kegiatan.</li><li>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.</li><li>3. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.</li><li>4. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</li><li>5. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</li><li>6. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</li><li>7. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</li><li>8. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</li><li>9. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</li><li>10. Informasi Tujuan, Kegiatan Rencana Struktur Ruang, Kegiatan Rencana Pola Ruang pada RDTR</li><li>11. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</li></ol> |

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 12. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS |
| Output | 1. Target sub Kegiatan RKPD<br>2. Data Tahapan sub Kegiatan RKPD                                    |

Kode Proses DAB28-09.01.04.02.04

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun Perubahan RKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deskripsi   | Proses penyusunan dokumen perubahan RKPD, apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, terdiri atas tahapan penyusunan rancangan, rancangan akhir, dan penetapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Input       | Data Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri atas:<br>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (output) Sub Kegiatan.<br>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.<br>3. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.<br>4. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.<br>5. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.<br>6. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.<br>7. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.<br>8. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.<br>9. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW. |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <div>10. Informasi Tujuan, Kegiatan Rencana Struktur Ruang, Kegiatan Rencana Pola Ruang pada RDTR</div> <div>11. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</div> <div>12. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</div> |
| Output | <div>1. Target sub Kegiatan Perubahan RKPD</div> <div>2. Data Tahapan sub Kegiatan Perubahan RKPD</div>                                                                                                                                                                                       |

Kode Proses DAB28-09.01.04.02.05

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun Dokumen Perencanaan dalam Kondisi Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Deskripsi   | Proses penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kondisi tertentu, seperti RPD/ Perubahan RPD, dilakukan apabila terjadi kondisi tertentu, terdiri atas tahapan rancangan, forum konsultasi publik, rancangan akhir, dan penetapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Input       | <div>Data Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri atas:</div> <div>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.</div> <div>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.</div> <div>3. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</div> <div>4. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</div> <div>5. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</div> <div>6. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</div> <div>7. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</div> |

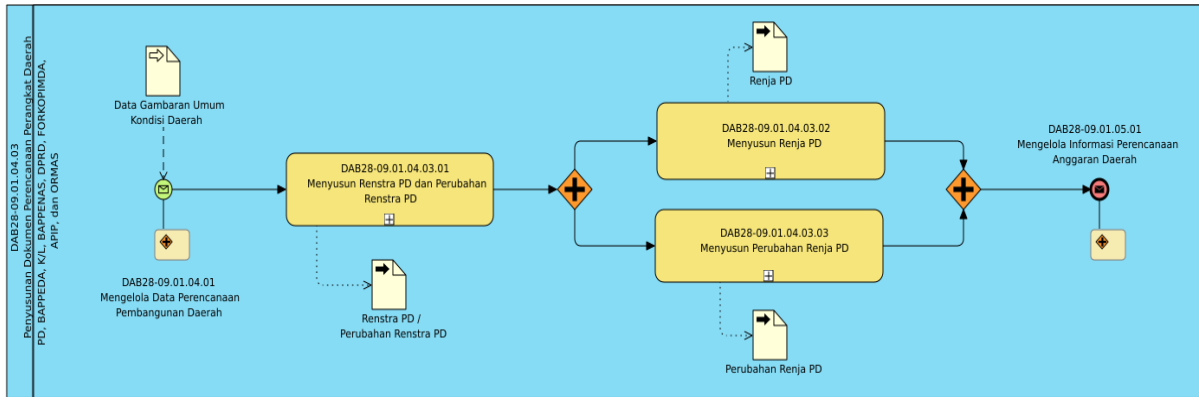
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <div>8. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</div> <div>9. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</div> <div>10. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</div> |
| Output | <div>1. Target program dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kondisi tertentu</div>                                                                                                                                                                                           |

G. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.04.03 Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis level 2-DAB28-09.01.04.03 Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini meliputi:

1. DAB28-09.01.04.03.01 Menyusun Renstra PD dan Perubahan Renstra PD
2. DAB28-09.01.04.03.02 Menyusun Renja PD
3. DAB28-09.01.04.03.03 Menyusun Perubahan Renja PD

Alur pada proses bisnis level 2-DAB28-09.01.04.03 Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilihat pada Gambar 5 sebagai berikut:



Gambar 5. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.04.03 Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses bisnis level 2-DAB28-09.01.04.03 Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terdiri atas:

Kode Proses DAB28-09.01.04.03.01

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun Renstra PD dan Perubahan Renstra PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deskripsi   | Proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun (Renstra PD) dan penyusunan dokumen Perubahan Renstra PD, terdiri atas tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, rancangan akhir, dan penetapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Input       | <p>Data Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (output) Sub Kegiatan.</li><li>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.</li><li>3. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.</li><li>4. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</li><li>5. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</li><li>6. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</li><li>7. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</li><li>8. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</li><li>9. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</li><li>10. Informasi Tujuan, Kegiatan Rencana Struktur Ruang, Kegiatan Rencana Pola Ruang pada RDTR</li><li>11. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</li></ol> |

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 12. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS |
| Output | 1. Target sub kegiatan Renstra PD<br>2. Target sub kegiatan Perubahan Renstra PD                    |

Kode Proses DAB28-09.01.04.03.02

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun Renja PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deskripsi   | Proses Penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun (Renja PD), terdiri atas tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, rancangan akhir, dan penetapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Input       | Data Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri atas:<br>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (output) Sub Kegiatan.<br>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.<br>3. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.<br>4. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.<br>5. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.<br>6. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.<br>7. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.<br>8. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah. |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <div>9. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</div> <div>10. Informasi Tujuan, Kegiatan Rencana Struktur Ruang, Kegiatan Rencana Pola Ruang pada RDTR</div> <div>11. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</div> <div>12. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</div> |
| Output | <div>1. Target sub kegiatan Renja PD</div> <div>2. Data Tahapan sub Kegiatan Renja PD</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Kode Proses DAB28-09.01.04.03.03

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun Perubahan Renja PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Deskripsi   | Proses Penyusunan dokumen Perubahan Renja PD, apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, terdiri atas tahapan penyusunan rancangan, rancangan akhir, dan penetapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Input       | <div>Data Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri atas:</div> <div>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (output) Sub Kegiatan.</div> <div>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.</div> <div>3. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.</div> <div>4. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</div> <div>5. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</div> <div>6. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</div> <div>7. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</div> |

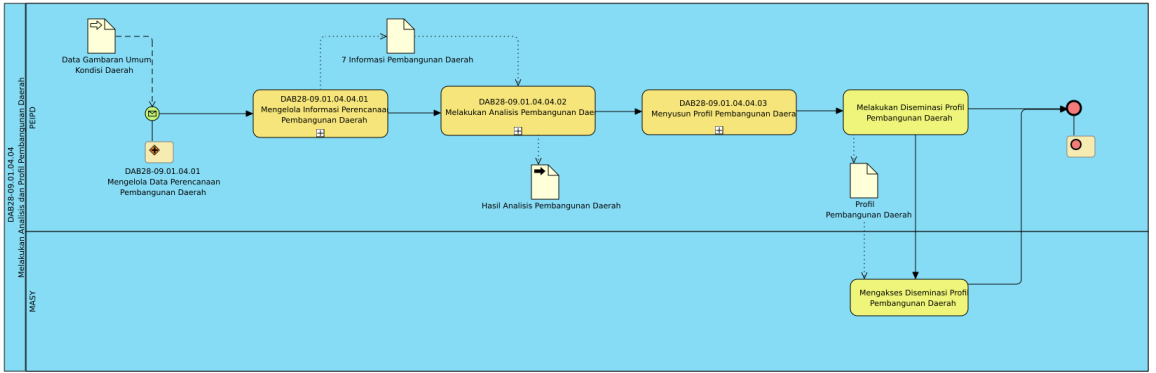
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <div>8. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</div> <div>9. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</div> <div>10. Informasi Tujuan, Kegiatan Rencana Struktur Ruang, Kegiatan Rencana Pola Ruang pada RDTR</div> <div>11. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</div> <div>12. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</div> |
| Output | <div>1. Target sub kegiatan Perubahan Renja PD</div> <div>2. Data Tahapan sub Kegiatan Perubahan Renja PD</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

H. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.04.04 Melakukan Analisis dan Profil Pembangunan Daerah

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis level 2-DAB28-09.01.04.04 Melakukan Analisis dan Profil Pembangunan Daerah ini meliputi:

1. DAB28-09.01.04.04.01 Mengelola Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. DAB28-09.01.04.04.02 Melakukan Analisis Pembangunan Daerah
3. DAB28-09.01.04.04.03 Menyusun Profil Pembangunan Daerah

Alur pada proses bisnis level 2-DAB28-09.01.04.04 Melakukan Analisis dan Profil Pembangunan Daerah dilihat pada Gambar 6 sebagai berikut:



Gambar 6. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.04.04 Melakukan Analisis dan Profil Pembangunan Daerah

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses bisnis level 2-DAB28-09.01.04.04 Melakukan Analisis dan Profil Pembangunan Daerah terdiri atas:

Kode Proses DAB28-09.01.04.04.01

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Mengelola Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Deskripsi   | Proses pengelolaan informasi hasil evaluasi pemerintah daerah, informasi kerangka ekonomi dan keuangan daerah dan informasi gambaran umum kondisi daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Input       | <p>Data Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (output) Sub Kegiatan.</li><li>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.</li><li>3. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.</li><li>4. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</li><li>5. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</li><li>6. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</li><li>7. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</li><li>8. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</li><li>9. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</li><li>10. Informasi Tujuan, Kegiatan Rencana Struktur Ruang, Kegiatan Rencana Pola Ruang pada RDTR</li></ol> |

|        |                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 11. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS<br>12. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS |
| Output | Informasi hasil evaluasi pemerintah daerah, informasi kerangka ekonomi dan keuangan daerah dan informasi gambaran umum kondisi daerah.                             |

Kode Proses DAB28-09.01.04.04.02

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Melakukan Analisis Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deskripsi   | Proses analisis yang dilakukan pemerintah terhadap data perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan profil daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Input       | Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.                                                                                                                                                                              |
| Output      | Hasil analisis pembangunan daerah, meliputi:<br>1. Analisis terhadap Kondisi geografis daerah<br>2. Analisis terhadap Demografi<br>3. Analisis terhadap Potensi sumber daya daerah<br>4. Analisis terhadap Ekonomi dan keuangan daerah<br>5. Analisis terhadap Aspek kesejahteraan masyarakat<br>6. Analisis terhadap Aspek pelayanan umum<br>7. Analisis terhadap Aspek daya saing daerah |

Kode Proses DAB28-09.01.04.04.03

|             |                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun Profil Pembangunan Daerah                                                                                                                                                   |
| Deskripsi   | Proses penyusunan profil daerah untuk menjadi dasar dalam memperbaharui data, serta informasi perencanaan pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat. |
| Input       | Hasil analisis pembangunan daerah, meliputi:<br>1. Analisis terhadap Kondisi geografis daerah                                                                                        |

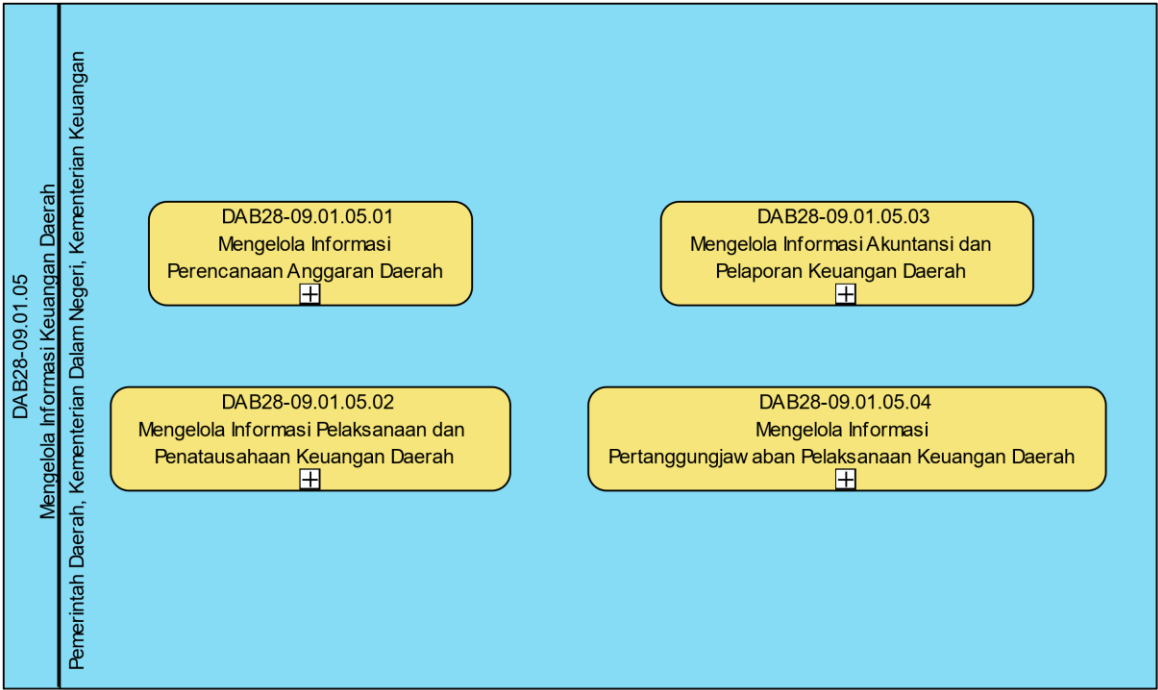
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>2. Analisis terhadap Demografi</li><li>3. Analisis terhadap Potensi sumber daya daerah</li><li>4. Analisis terhadap Ekonomi dan keuangan daerah</li><li>5. Analisis terhadap Aspek kesejahteraan masyarakat</li><li>6. Analisis terhadap Aspek pelayanan umum</li><li>7. Analisis terhadap Aspek daya saing daerah</li></ul>                                |
| Output | <p>Profil informasi pembangunan daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Profil Kondisi geografis daerah</li><li>2. Profil Demografi</li><li>3. Profil Potensi sumber daya daerah</li><li>4. Profil Ekonomi dan keuangan daerah</li><li>5. Profil Aspek kesejahteraan masyarakat</li><li>6. Profil Aspek pelayanan umum</li><li>7. Profil Aspek daya saing daerah</li></ul> |

I. Proses Bisnis Level 1-DAB28-09.01.05 Mengelola Informasi Keuangan Daerah

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis level 1-DAB28-09.01.05 Mengelola Informasi Keuangan Daerah ini meliputi:

- 1. DAB28-09.01.05.01 Mengelola Informasi Perencanaan Anggaran Daerah
- 2. DAB28-09.01.05.02 Mengelola Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
- 3. DAB28-09.01.05.03 Mengelola Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 4. DAB28-09.01.05.04 Mengelola Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah

Alur pada proses bisnis level 1-DAB28-09.01.05 Mengelola Informasi Keuangan Daerah dilihat pada Gambar 7 sebagai berikut:



Gambar 7. Proses Bisnis Level 1-DAB28-09.01.05 Mengelola Informasi Keuangan Daerah

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses level 1-DAB28-09.01.05 Mengelola Informasi Keuangan Daerah terdiri atas:

Kode Proses DAB28-09.01.05.01

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Mengelola Informasi Perencanaan Anggaran Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Deskripsi   | Informasi perencanaan anggaran daerah dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah berbasis elektronik, meliputi:<br><br>1. Penyusunan KUA<br>2. Penyusunan PPAS<br>3. Penyusunan Rancangan APBD<br>4. Penetapan APBD<br>5. Pergeseran Anggaran<br>6. Penyusunan Perubahan KUA<br>7. Penyusunan Perubahan PPAS<br>8. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD<br>9. Penetapan Perubahan APBD |
| Input       | 1. RKPD<br>2. Perubahan RKPD<br>3. Renja PD<br>4. Perubahan Renja PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Output      | 1. APBD<br>2. Perubahan APBD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>3. KUA</li><li>4. PPAS</li><li>5. Perubahan KUA</li><li>6. Perubahan PPAS</li><li>7. RKA SKPD</li><li>8. Perubahan RKA SKPD</li><li>9. Pergeseran RKA SKPD</li></ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kode Proses DAB28-09.01.05.02

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Mengelola Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Deskripsi   | <p>Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dihasilkan dari tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah berbasis elektronik, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. pelaksanaan DPA-SKPD</li><li>2. pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan dana</li><li>3. pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah</li><li>4. Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan</li><li>5. Pelaksanaan dan penatausahaan belanja</li><li>6. Pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan.</li></ul> |
| Input       | <ul style="list-style-type: none"><li>1. APBD</li><li>2. Pergeseran Anggaran</li><li>3. Perubahan APBD</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Output      | <ul style="list-style-type: none"><li>1. BKU Pendapatan</li><li>2. BKU Belanja</li><li>3. BKU Pembiayaan</li><li>4. SPJ Pendapatan</li><li>5. SPJ Belanja</li><li>6. SPJ Pembiayaan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Kode Proses DAB28-09.01.05.03

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Mengelola Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                     |
| Deskripsi   | Pengelolaan Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dihasilkan dari tahapan akuntansi |

|        |                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan/semesteran/tahunan.                    |
| Input  | 1. BKU Pendapatan<br>2. BKU Belanja<br>3. BKU Pembiayaan<br>4. SPJ Pendapatan<br>5. SPJ Belanja<br>6. SPJ Pembiayaan |
| Output | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)                                                                            |

Kode Proses DAB28-09.01.05.03

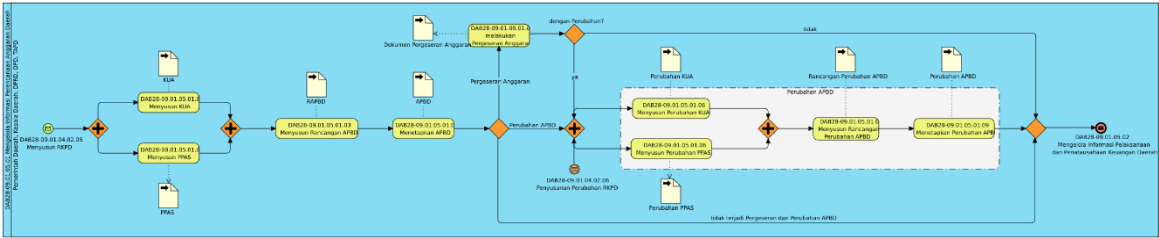
|             |                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Mengelola Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah                                                                                             |
| Deskripsi   | Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah dihasilkan dari proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik. |
| Input       | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                             |
| Output      | Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah                                                                                                                   |

J. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.05.01 Mengelola Informasi Perencanaan Anggaran Daerah

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis level 2-DAB28-09.01.05.01 Mengelola Informasi Perencanaan Anggaran Daerah ini meliputi:

1. DAB28-09.01.05.01.01 Menyusun KUA
2. DAB28-09.01.05.01.02 Menyusun PPAS
3. DAB28-09.01.05.01.03 Menyusun Rancangan APBD
4. DAB28-09.01.05.01.04 Menetapkan APBD
5. DAB28-09.01.05.01.05 Melakukan Pergeseran Anggaran
6. DAB28-09.01.05.01.06 Menyusun Perubahan KUA
7. DAB28-09.01.05.01.07 Menyusun Perubahan PPAS
8. DAB28-09.01.05.01.08 Menyusun Rancangan Perubahan APBD
9. DAB28-09.01.05.01.09 Menetapkan Perubahan APBD

Alur pada proses bisnis level 2- DAB28-09.01.05.01 Mengelola Informasi Perencanaan Anggaran Daerah dilihat pada Gambar 8 sebagai berikut:



Gambar 8. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.05.01 Mengelola Informasi Perencanaan Anggaran Daerah

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses level 2- DAB28-09.01.05.01 Mengelola Informasi Perencanaan Anggaran Daerah terdiri atas:

Kode Proses DAB28-09.01.05.01.01

|             |                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun KUA                                                                                                                                            |
| Deskripsi   | Proses penyusunan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. |
| Input       | RKPD                                                                                                                                                    |
| Output      | KUA                                                                                                                                                     |

Kode Proses DAB28-09.01.05.01.02

|             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun PPAS                                                                                                                                                                                                                     |
| Deskripsi   | Proses penyusunan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. |
| Input       | RKPD                                                                                                                                                                                                                              |
| Output      | PPAS                                                                                                                                                                                                                              |

Kode Proses DAB28-09.01.05.01.03

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun Rancangan APBD                                             |
| Deskripsi   | Penyusunan Rancangan APBD setelah disepakatinya Perubahan KUA-PPAS. |
| Input       | 1. KUA<br>2. PPAS                                                   |
| Output      | 1. RKA SKPD<br>2. Rancangan APBD                                    |

Kode Proses DAB28-09.01.05.01.04

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menetapkan APBD                                                                    |
| Deskripsi   | Penetapan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. |
| Input       | Rancangan APBD                                                                     |
| Output      | APBD                                                                               |

Kode Proses DAB28-09.01.05.01.05

|             |                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Melakukan Pergeseran Anggaran                                                                            |
| Deskripsi   | Proses yang dilakukan jika terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan dilaksanakan pergeseran anggaran. |
| Input       | 1. APBD<br>2. DPA SKPD                                                                                   |
| Output      | Pergeseran RKA SKPD                                                                                      |

Kode Proses DAB28-09.01.05.01.06

|             |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun Perubahan KUA                                                                                      |
| Deskripsi   | Proses yang dilaksanakan jika terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan Perubahan RKPD. |
| Input       | 1. KUA<br>2. Perubahan RKPD                                                                                 |
| Output      | Perubahan KUA                                                                                               |

Kode Proses DAB28-09.01.05.01.07

|             |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun Perubahan PPAS                                                                                     |
| Deskripsi   | Proses yang dilaksanakan jika terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan Perubahan RKPD. |
| Input       | 1. PPAS<br>2. Perubahan RKPD                                                                                |
| Output      | Perubahan PPAS                                                                                              |

Kode Proses DAB28-09.01.05.01.08

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun Rancangan Perubahan APBD |
|-------------|-----------------------------------|

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Deskripsi | Penyusunan Rancangan Perubahan APBD setelah disepakatinya Perubahan KUA-PPAS. |
| Input     | 1. APBD<br>2. Perubahan KUA<br>3. Perubahan PPAS                              |
| Output    | 1. Perubahan RKA SKPD<br>2. Rancangan Perubahan APBD                          |

Kode Proses DAB28-09.01.05.01.09 Penetapan Perubahan APBD

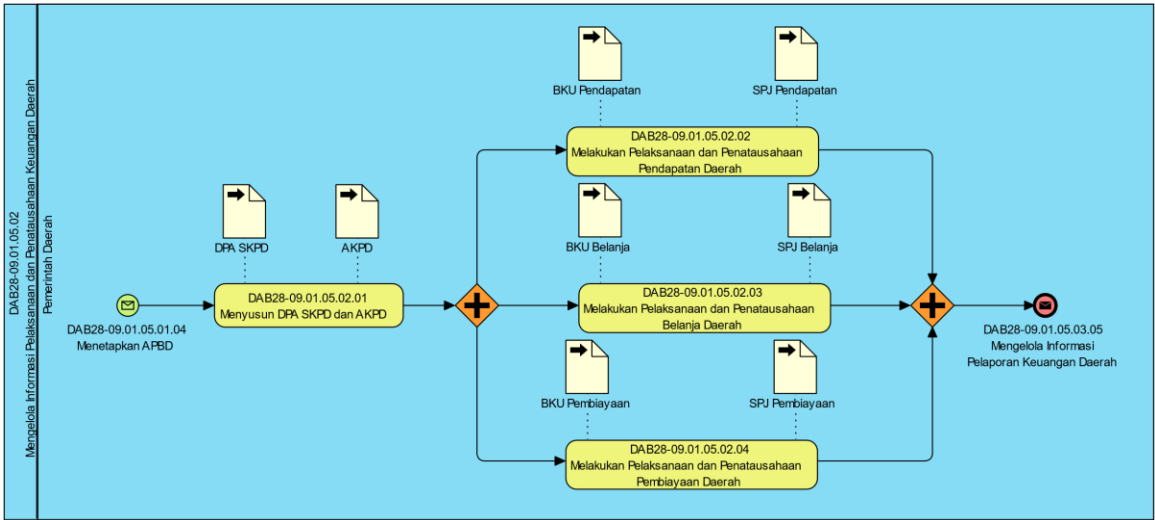
|             |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menetapkan Perubahan APBD                                                                    |
| Deskripsi   | Penetapan perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. |
| Input       | Rancangan Perubahan APBD                                                                     |
| Output      | Perubahan APBD                                                                               |

K. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.05.02 Mengelola Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis level 2-DAB28-09.01.05.02 Mengelola Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah ini meliputi:

1. DAB28-09.01.05.02.01 Menyusun DPA SKPD dan AKPD
2. DAB28-09.01.05.02.02 Melakukan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
3. DAB28-09.01.05.02.03 Melakukan Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah
4. DAB28-09.01.05.02.04 Melakukan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Alur pada proses bisnis level 2-DAB28-09.01.05.02 Mengelola Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah dilihat pada Gambar 9 sebagai berikut:



Gambar 9. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.05.02  
Mengelola Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses level 2-DAB28-09.01.05.02 Mengelola Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah terdiri atas:

Kode Proses DAB28-09.01.05.02.01

|             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun DPA SKPD dan AKPD                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deskripsi   | Penyusunan DPA SKPD dan AKPD adalah proses penyusunan dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. |
| Input       | 1. APBD<br>2. Pergeseran Anggaran<br>3. Perubahan APBD                                                                                                                                                                                                       |
| Output      | 1. DPA SKPD<br>2. AKPD                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                              |

Kode Proses DAB28-09.01.05.02.02

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Melakukan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah |
|-------------|-----------------------------------------------------------|

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deskripsi | Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah meliputi penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui buku-buku bendahara penerimaan, pertanggungjawaban bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu. |
| Input     | DPA SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Output    | 1. BKU Pendapatan<br>2. SPJ Pendapatan                                                                                                                                                                                                                                                |

Kode Proses DAB28-09.01.05.02.03

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Melakukan Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah                                                                                                                                                                                                         |
| Deskripsi   | Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah meliputi penatausahaan Bendahara pengeluaran, penatausahaan pengeluaran dari RKUD, pengendalian melalui buku-buku bendahara pengeluaran, pertanggungjawaban bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. |
| Input       | 1. DPA SKPD<br>2. AKPD<br>3. SPD                                                                                                                                                                                                                               |
| Output      | 1. BKU Belanja<br>2. SPJ Belanja                                                                                                                                                                                                                               |

Kode Proses DAB28-09.01.05.04

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Melakukan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                                                            |
| Deskripsi   | Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah meliputi penatausahaan penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, penatausahaan penerimaan pembiayaan ke RKUD, pengeluaran pembiayaan dari RKUD, pengendalian melalui buku-buku pembantu pengelolaan pembiayaan. |

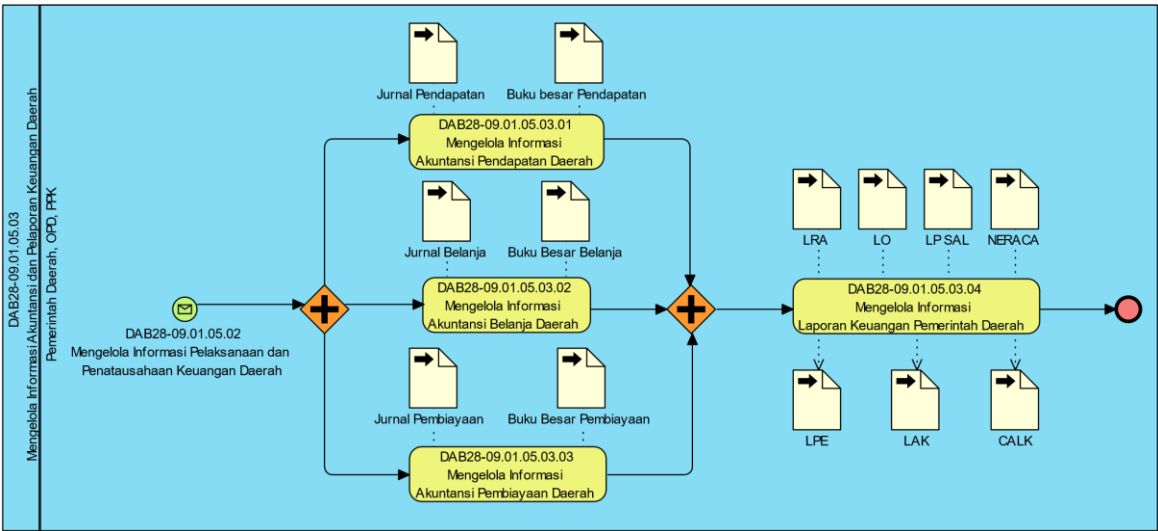
|        |                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input  | 1. DPA SKPD<br>2. AKPD<br>3. SPD                                                                                               |
| Output | 1. BKU Penerimaan Pembiayaan<br>2. BKU Pengeluaran Pembiayaan<br>3. SPJ Penerimaan Pembiayaan<br>4. SPJ Pengeluaran Pembiayaan |

L. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.05.03 Mengelola Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis level 2-DAB28-09.01.05.03 Mengelola Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ini meliputi:

- 1. DAB28-09.01.05.03.01 Mengelola Informasi Akuntansi Pendapatan Daerah
- 2. DAB28-09.01.05.03.02 Mengelola Informasi Akuntansi Belanja Daerah
- 3. DAB28-09.01.05.03.03 Mengelola Informasi Akuntansi Pembiayaan Daerah
- 4. DAB28-09.01.05.03.04 Mengelola Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Alur pada proses bisnis level 2-DAB28-09.01.05.03 Mengelola Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dilihat pada Gambar 10 sebagai berikut:



Gambar 10. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.05.03  
Mengelola Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses level 2-DAB28-09.01.05.03 Mengelola Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri atas:

Kode Proses DAB28-09.01.05.03.01

|             |                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Mengelola Informasi Akuntansi Pendapatan Daerah                                                                                                                                        |
| Deskripsi   | Akuntansi Pendapatan Daerah meliputi proses akuntansi terhadap transaksi-transaksi pendapatan berdasarkan dokumen penetapan dan dokumen penerimaan pendapatan daerah secara eletronik. |
| Input       | 1. BKU Pendapatan<br>2. SPJ Pendapatan                                                                                                                                                 |
| Output      | 1. Jurnal Pendapatan<br>2. Buku Besar Pendapatan                                                                                                                                       |

Kode Proses DAB28-09.01.05.03.02

|             |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Mengelola Informasi Akuntansi Belanja Daerah                                                                                                                                                                                |
| Deskripsi   | Akuntansi Belanja Daerah meliputi proses akuntansi terhadap transaksi-transaksi belanja berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja pada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan pengeluaran dari RKUD. |
| Input       | 1. BKU Belanja<br>2. SPJ Belanja                                                                                                                                                                                            |
| Output      | 1. Jurnal Belanja<br>2. Buku Besar Belanja                                                                                                                                                                                  |

Kode Proses DAB28-09.01.05.03.03

|             |                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Mengelola Informasi Akuntansi Pembiayaan Daerah                                                                                                        |
| Deskripsi   | Akuntansi Pembiayaan Daerah meliputi proses akuntansi atas transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, yang diproses secara elektronik. |
| Input       | 1. BKU Penerimaan Pembiayaan<br>2. BKU Pengeluaran Pembiayaan<br>3. SPJ Penerimaan Pembiayaan<br>4. SPJ Pengeluaraan Pembiayaan                        |

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| Output | 1. Jurnal Pembiayaan<br>2. Buku Besar Pembiayaan |
|--------|--------------------------------------------------|

Kode Proses DAB28-09.01.05.03.04

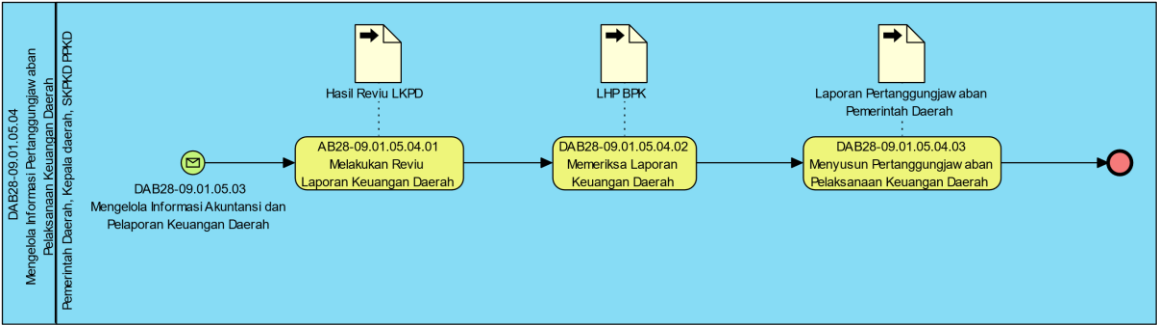
|             |                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Mengelola Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                            |
| Deskripsi   | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan informasi tentang laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun periode anggaran. |
| Input       | 1. Jurnal<br>2. Buku Besar<br>3. Neraca Saldo<br>4. Realisasi Anggaran Tahun n-1.                                                                 |
| Output      | 1. LRA<br>2. LO<br>3. LP-SAL<br>4. LPE<br>5. LAK<br>6. NERACA<br>7. CALK                                                                          |

M. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.05.04 Mengelola Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis level 2-DAB28-09.01.05.04 Mengelola Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah ini meliputi:

1. DAB28-09.01.05.04.01 Melakukan Reviu Laporan Keuangan Daerah
2. DAB28-09.01.05.04.02 Memeriksa Laporan Keuangan Daerah
3. DAB28-09.01.05.04.03 Menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah

Alur pada proses bisnis level 2-DAB28-09.01.05.04 Mengelola Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah dilihat pada Gambar 11 sebagai berikut:



Gambar 11. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.05.04  
Mengelola Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses level 2-DAB28-09.01.05.04 Pengelolaan Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah terdiri atas:

Kode Proses DAB28-09.01.05.04.01

|             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Melakukan Reviu Laporan Keuangan daerah                                                                                                                                                                                                |
| Deskripsi   | Proses pelaksanaan Reviu atas Laporan APBD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. |
| Input       | LKPD                                                                                                                                                                                                                                   |
| Output      | Hasil Reviu LKPD                                                                                                                                                                                                                       |

Kode Proses DAB28-09.01.05.04.02

|             |                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Memeriksa Laporan Keuangan Daerah                                                                                                     |
| Deskripsi   | Proses Pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). |
| Input       | LKPD yang telah direviu                                                                                                               |
| Output      | Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.                                                                         |

Kode Proses DAB28-09.01.05.04.03

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah |
|-------------|---------------------------------------------------------|

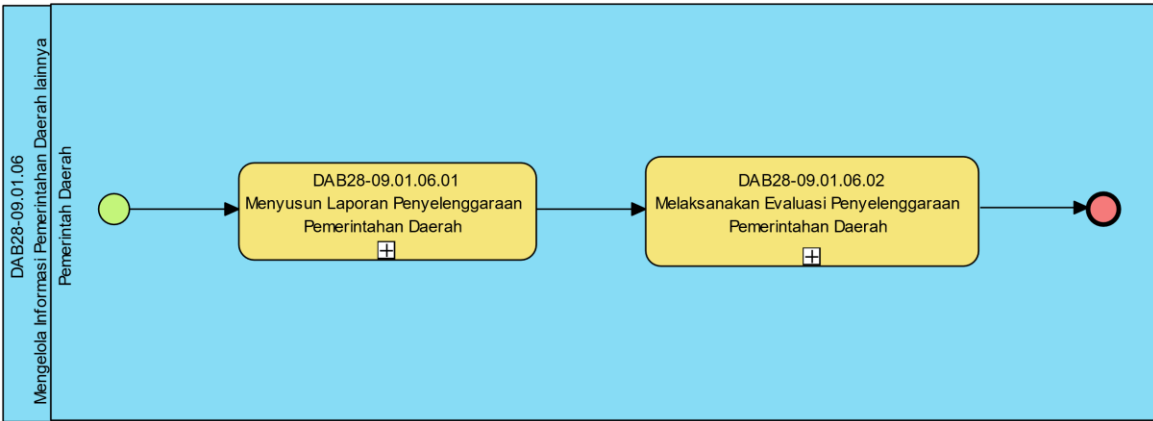
|           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deskripsi | Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah merupakan penyelesaian akhir dari proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK |
| Input     | LHP BPK.                                                                                                                                                                                                        |
| Output    | Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                    |

N. Proses Bisnis Level 1-DAB28-09.01.06 Mengelola Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis level 1-DAB28-09.01.06 Mengelola Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya ini meliputi:

- 1. DAB28-09.01.06.01 Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 2. DAB28-09.01.06.02 Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Alur pada proses bisnis level 1-DAB28-09.01.06 Pengelolaan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya dilihat pada Gambar 12 sebagai berikut:



Gambar 12. Proses Bisnis Level 1-DAB28-09.01.06 Mengelola Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses level 2-DAB28-09.01.06 Mengelola Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya terdiri atas:

Kode Proses DAB28-09.01.06.01

|             |                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                       |
| Deskripsi   | merupakan proses yang dilakukan untuk menyusun laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan |

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
|        | pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran |
| Input  | Dokumen dan Data Dasar Capaian Kinerja                      |
| Output | LPPD                                                        |

Kode Proses DAB28-09.01.06.02

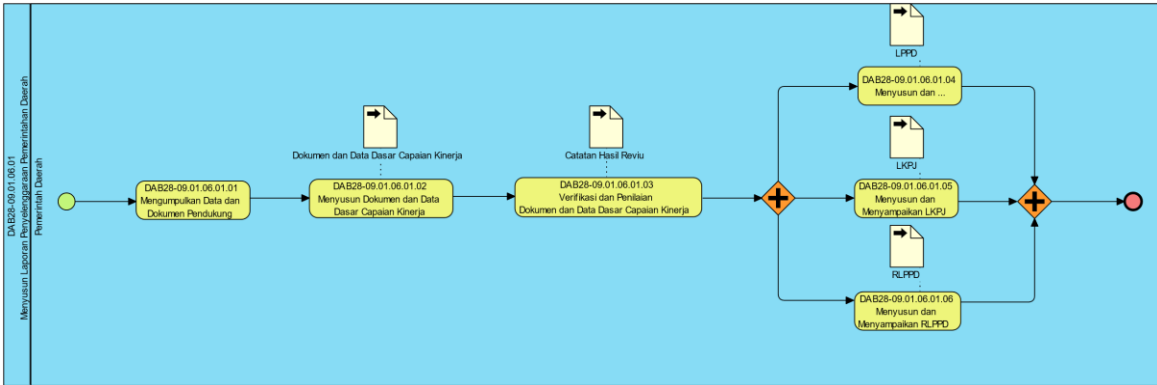
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                        |
| Deskripsi   | Merupakan suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| Input       | LPPD                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Output      | Hasil EPPD                                                                                                                                                                                                                                                                       |

O. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.06.01 Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis level 2-DAB28-09.01.06.01 Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini meliputi:

1. DAB28-09.01.06.01.01 Mengumpulkan Data dan Dokumen Pendukung
2. DAB28-09.01.06.01.02 Menyusun Dokumen dan Data Dasar Capaian Kinerja
3. DAB28-09.01.06.01.03 Verifikasi dan Penilaian Dokumen dan Data Dasar Capaian Kinerja
4. DAB28-09.01.06.01.04 Menyusun dan Menyampaikan LPPD
5. DAB28-09.01.06.01.05 Menyusun dan Menyampaikan LKPJ
6. DAB28-09.01.06.01.06 Menyusun dan Menyampaikan RLPPD

Alur pada proses bisnis level 2-DAB28-09.01.06.01 Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut:



Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses level 2-DAB28-09.01.06.01 Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas:

Kode Proses DAB28-09.01.06.01.01

|             |                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Mengumpulkan Data dan Dokumen Pendukung                                                                                                                              |
| Deskripsi   | melakukan pengumpulan data dan dokumen pendukung capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan dengan tahapan penyiapan data dan kompilasi data |
| Input       | 1. Keputusan Kepala Daerah terkait dengan Tim Penyusun<br>2. Data dan dokumen pendukung capaian kinerja setiap Perangkat Daerah                                      |
| Output      | Data dan dokumen pendukung capaian kinerja dari seluruh Perangkat Daerah                                                                                             |

Kode Proses DAB28-09.01.06.01.02

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun Dokumen Data Dasar Capaian Kinerja                                                       |
| Deskripsi   | menyusun dokumen data dukung capaian kinerja yang telah dikumpulkan dari seluruh Perangkat Daerah |
| Input       | Data dan Dokumen Pendukung dari seluruh Perangkat Daerah                                          |
| Output      | Dokumen Data Dasar Capaian Kinerja                                                                |

Kode Proses DAB28-09.01.06.01.03

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Verifikasi dan Penilaian Dokumen Data Dasar Capaian Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deskripsi   | merupakan suatu proses pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan data keuangan dan sebagainya, serta melakukan reviu dokumen dan data dasar capaian kinerja yang merupakan penelusuran bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh Tim Pereviu |
| Input       | Dokumen dan Data Dasar capaian Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Output      | Hasil Verifikasi dan Penilaian Dokumen dan Data Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Kode Proses DAB28-09.01.06.01.04

|             |                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun dan Menyampaikan LPPD                                                                                                                                                                 |
| Deskripsi   | Proses selanjutnya adalah penyusunan dan penyampaian LPPD yang disusun dengan menggunakan format sistematika dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| Input       | Dokumen dan Data Dasar capaian Kinerja yang telah diverifikasi dan diberikan penilaian oleh Tim Pereviu                                                                                        |
| Output      | LPPD                                                                                                                                                                                           |

Kode Proses DAB28 09.01.06.01.05

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun dan Menyampaikan LKPJ                                                                        |
| Deskripsi   | Penyusunan dan penyampaian LKPJ dapat dilakukan secara paralel dengan penyusunan dan penyampaian LPPD |
| Input       | Dokumen Data dan Dasar Pencapaian Kerja yang telah diverifikasi dan diberikan penilaian               |
| Output      | LKPJ                                                                                                  |

Kode Proses DAB28-09.01.06.01.06

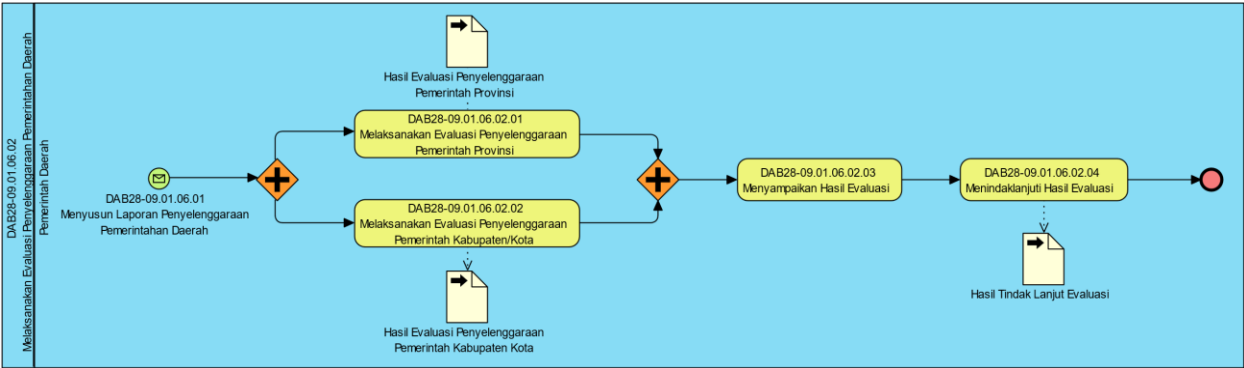
|             |                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyusun dan Menyampaikan RLPPD                                                                                 |
| Deskripsi   | Penyusunan dan penyampaian RLPPD dapat dilakukan secara paralel dengan penyusunan dan penyampaian LPPD dan LKPJ |
| Input       | Dokumen dan Data Dasar Pencapaian Kerja yang telah diverifikasi dan diberikan penilaian                         |
| Output      | RLPPD                                                                                                           |

P. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.06.02 Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis level 2-DAB28-09.01.06.02 Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini meliputi:

- 1. DAB28-09.01.06.02.01 Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi
- 2. DAB28-09.01.06.02.02 Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3. DAB28-09.01.06.02.03 Menyampaikan Hasil Evaluasi
- 4. DAB28-09.01.06.02.04 Menindaklanjuti Hasil Evaluasi

Alur pada proses bisnis level 2-DAB28-09.01.06.02 Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilihat pada Gambar 13 sebagai berikut:



Gambar 13. Proses Bisnis Level 2-DAB28-09.01.06.02 Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses level 2-DAB28-09.01.06.02 Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas:

Kode Proses DAB28-09.01.06.02.01

|             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                         |
| Deskripsi   | merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| Input       | LPPD Provinsi                                                                                                                                                                                                     |
| Output      | Hasil EPPD Provinsi                                                                                                                                                                                               |

Kode proses DAB28-09.01.06.02.02

|             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                      |
| Deskripsi   | merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| Input       | LPPD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                  |
| Output      | Hasil EPPD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                            |

Kode Proses DAB28-09.01.06.02.03

|             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menyampaikan Hasil Evaluasi                                                                                                         |
| Deskripsi   | merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota |
| Input       | 1. Hasil EPPD Provinsi<br>2. Hasil EPPD Kabupaten/Kota                                                                              |
| Output      | 1. Hasil EPPD<br>2. Berita Acara Penyampaian Hasil Evaluasi                                                                         |

Kode Proses DAB28-09.01.06.02.04

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Proses | Menindaklanjuti Hasil Evaluasi                                                    |
| Deskripsi   | merupakan suatu proses lanjutan yang dilakukan setelah penyampaian hasil evaluasi |

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| Input  | Hasil EPPD                                 |
| Output | Dokumen Tindak Lanjut Hasil Penilaian EPPD |

BAB IV  
PERSYARATAN DATA

Persyaratan data merupakan syarat pemenuhan terhadap Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan basis data Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah ataupun aplikasi sejenis. Persyaratan ini mencakup inventaris entitas data, kode referensi data, matriks relasi antar entitas data, dan diagram relasi antar entitas data. Model data digambarkan dengan menggunakan model *Integration Definition* (IDEF).

A. Inventaris Entitas Data

Pada model *Integration Definition* (IDEF), tahapan pertama dilakukan inventarisasi entitas data pada proses bisnis yang telah dibuat. Adapun hasil inventarisasi entitas data yang ada pada proses bisnis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

| No | Nama Entitas Data      | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | RPJPD/ Perubahan RPJPD | <p>Entitas dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun (RPJPD) dan penyusunan dokumen perubahan RPJPD terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok (Indikator Makro).</li><li>2. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</li><li>3. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</li><li>4. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</li><li>5. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</li></ol> |

| No | Nama Entitas Data      | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        | <p>6. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</p> <p>7. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</p> <p>8. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</p> <p>9. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</p> <p>10. Visi Daerah</p> <p>11. Misi Daerah</p> <p>12. Arah Kebijakan</p> <p>13. Sasaran Pokok</p> <p>14. Indikator Sasaran Pokok (Indikator Makro)</p> |
| 2  | RPJMD/ Perubahan RPJMD | <p>Entitas dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun (RPJMD) dan penyusunan dokumen perubahan RPJMD terdiri atas:</p> <p>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.</p> <p>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |

| No | Nama Entitas Data | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | <div>3. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</div> <div>4. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</div> <div>5. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</div> <div>6. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</div> <div>7. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</div> <div>8. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</div> <div>9. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</div> <div>10. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</div> <div>11. Visi Kepala Daerah</div> <div>12. Misi Kepala Daerah</div> <div>13. Tujuan</div> <div>14. Indikator Tujuan</div> <div>15. Sasaran</div> <div>16. Indikator Sasaran (Indikator Urusan/Lintas Urusan)</div> <div>17. Program</div> <div>18. Indikator Program</div> |

| No | Nama Entitas Data | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | RKPD              | <p>Entitas dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun (RKPD) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (output) Sub Kegiatan.</li><li>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.</li><li>3. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.</li><li>4. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</li><li>5. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</li><li>6. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</li><li>7. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</li><li>8. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</li><li>9. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</li></ol> |

| No | Nama Entitas Data | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | <div>10. Informasi Tujuan, Kegiatan Rencana Struktur Ruang, Kegiatan Rencana Pola Ruang pada RDTR</div> <div>11. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</div> <div>12. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</div> <div>13. Kegiatan</div> <div>14. Indikator Kegiatan</div> <div>15. Sub Kegiatan</div> <div>16. Kinerja Sub Kegiatan</div> <div>17. Indikator Sub Kegiatan</div> <div>18. Data Tahapan sub Kegiatan RKPD</div>                                                                                                                                                 |
| 4  | Perubahan RKPD    | <div>Entitas dokumen perubahan RKPD, apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terdiri atas:</div> <div>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (output) Sub Kegiatan.</div> <div>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.</div> <div>3. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.</div> <div>4. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</div> <div>5. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</div> |

| No | Nama Entitas Data | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | <p>6. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</p> <p>7. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</p> <p>8. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</p> <p>9. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</p> <p>10. Informasi Tujuan, Kegiatan Rencana Struktur Ruang, Kegiatan Rencana Pola Ruang pada RDTR</p> <p>11. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</p> <p>12. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</p> <p>13. Kegiatan</p> <p>14. Indikator Kegiatan</p> <p>15. Sub Kegiatan</p> <p>16. Kinerja Sub Kegiatan</p> <p>17. Indikator Sub Kegiatan</p> <p>18. Data Tahapan sub Kegiatan Perubahan RKPD</p> |
| 5  | RPD               | Entitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kondisi tertentu, seperti RPD/ Perubahan RPD terdiri atas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No | Nama Entitas Data | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.</li><li>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.</li><li>3. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</li><li>4. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</li><li>5. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</li><li>6. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</li><li>7. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</li><li>8. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</li><li>9. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</li><li>10. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</li><li>11. Tujuan</li></ol> |

| No | Nama Entitas Data                   | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     | 12. Indikator Tujuan<br>13. Sasaran<br>14. Indikator Sasaran (Indikator Urusan/Lintas Urusan)<br>15. Program<br>16. Indikator Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | Renstra PD/<br>Perubahan Renstra PD | Entitas dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun (Renstra PD) dan penyusunan dokumen Perubahan Renstra PD terdiri atas:<br><br>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (output) Sub Kegiatan.<br>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.<br>3. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.<br>4. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.<br>5. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.<br>6. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.<br>7. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.<br>8. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan |

| No | Nama Entitas Data | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | <p>sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</p> <p>9. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</p> <p>10. Informasi Tujuan, Kegiatan Rencana Struktur Ruang, Kegiatan Rencana Pola Ruang pada RDTR</p> <p>11. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</p> <p>12. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</p> <p>13. Tujuan</p> <p>14. Indikator Tujuan</p> <p>15. Sasaran</p> <p>16. Indikator Sasaran (Indikator Urusan/ Lintas Urusan)</p> <p>17. Program</p> <p>18. Indikator Program</p> <p>19. Kegiatan</p> <p>20. Indikator Kegiatan</p> <p>21. Sub Kegiatan</p> <p>22. Kinerja Sub Kegiatan</p> <p>23. Indikator Sub Kegiatan</p> |
| 7  | Renja PD          | <p>Entitas dokumen rencana kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun (Renja PD) terdiri atas:</p> <p>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (output) Sub Kegiatan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No | Nama Entitas Data | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | <div>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.</div> <div>3. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.</div> <div>4. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.</div> <div>5. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.</div> <div>6. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.</div> <div>7. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan.</div> <div>8. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</div> <div>9. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</div> <div>10. Informasi Tujuan, Kegiatan Rencana Struktur Ruang, Kegiatan Rencana Pola Ruang pada RDTR</div> <div>11. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</div> <div>12. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan</div> |

| No | Nama Entitas Data  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS<br>13. Kegiatan<br>14. Indikator Kegiatan<br>15. Sub Kegiatan<br>16. Kinerja Sub Kegiatan<br>17. Indikator Sub Kegiatan<br>18. Data Tahapan sub Kegiatan Renja PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | Perubahan Renja PD | Entitas dokumen Perubahan Renja PD, apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terdiri atas:<br><br>1. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Keluaran (output) Sub Kegiatan.<br>2. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap Hasil (outcome) Urusan/Lintas Urusan.<br>3. Data Hasil evaluasi antara capaian, target dan kebutuhan sumberdaya terhadap dampak (benefit/impact) indikator sasaran dan sasaran pokok.<br>4. Informasi kondisi ekonomi dan perkiraan kedepan.<br>5. Informasi PDRB dan perkiraan kedepan.<br>6. Informasi Pendapatan Daerah dan perkiraan pendapatan kedepan.<br>7. Informasi Pelaksanaan Anggaran dan perkiraan kebutuhan indikatif anggaran kedepan. |

| No | Nama Entitas Data        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          | <p>8. Informasi Gambaran umum kondisi Daerah berdasarkan aspek: geografis, demografi, potensi dan sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah.</p> <p>9. Informasi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Program Utama pada RTRW.</p> <p>10. Informasi Tujuan, Kegiatan Rencana Struktur Ruang, Kegiatan Rencana Pola Ruang pada RDTR</p> <p>11. Informasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan pada KLHS</p> <p>12. Informasi capaian dan target sasaran dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada KLHS</p> <p>13. Kegiatan</p> <p>14. Indikator Kegiatan</p> <p>15. Sub Kegiatan</p> <p>16. Kinerja Sub Kegiatan</p> <p>17. Indikator Sub Kegiatan</p> <p>18. Data Tahapan sub Kegiatan Perubahan Renja PD</p> |
| 9  | Sasaran Pokok            | Entitas Sasaran Pokok yang berisi indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, untuk periode 20 tahun (RPJPD), memuat indikator makro pembangunan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | Indikator Kinerja Daerah | Entitas Indikator Kinerja Daerah yang berisi indikator outcome dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No | Nama Entitas Data | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | dicapai, relevan, untuk periode 5 tahun (RPJMD dan Renstra PD), memuat indikator urusan dan lintas urusan pada indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah.                                                                              |
| 11 | Sub Kegiatan      | Entitas Sub Kegiatan yang berisi indikator output dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, untuk periode 1 tahun (RKPD dan Renja PD)                                                                                                                       |
| 12 | Tahapan           | Entitas Tahapan yang berisi ruang lingkup pelaksanaan sub kegiatan yang meliputi masukan, atau usulan berdasarkan pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk data target, pagu alokasi pendanaan indikatif, dan lokasi pelaksanaan.                |
| 6  | APBD              | Entitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi informasi tentang rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda                                                                                                                                            |
| 7  | Rancangan APBD    | Entitas yang berisi informasi mengenai rancangan rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.                                                                                                                                                 |
| 8  | KUA               | Entitas Kebijakan Umum APBD yang berisi informasi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat:<br>1. kondisi ekonomi makro daerah;<br>2. asumsi penyusunan APBD;<br>3. kebijakan Pendapatan Daerah; |

| No | Nama Entitas Data | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | 4. kebijakan Belanja Daerah;<br>5. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan<br>6. strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. |
| 9  | PPAS              | Entitas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang berisi informasi program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.                  |
| 10 | RKA SKPD          | Entitas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.      |
| 11 | Perubahan APBD    | Entitas yang berisi informasi perubahan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda yang dapat dilakukan jika terjadi:<br>1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;<br>2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar                               |

| No | Nama Entitas Data        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          | organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;<br>3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;<br>4. keadaan darurat; dan/atau<br>5. keadaan luar biasa.                                                                                |
| 12 | Rancangan Perubahan APBD | Entitas yang berisi informasi mengenai perubahan rancangan rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | Perubahan KUA            | Entitas yang berisi informasi perubahan dokumen KUA yang perkembangannya tidak sesuai dengan asumsi awal yang dapat dapat berupa terjadinya:<br>1. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;<br>2. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau<br>3. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.                |
| 14 | Perubahan PPAS           | Entitas yang berisi informasi perubahan dokumen PPAS yang disertai penjelasan:<br>1. program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;<br>2. capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan |

| No | Nama Entitas Data   | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan<br>3. capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.                                                                                                   |
| 15 | Perubahan RKA SKPD  | Entitas yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh masing-masing SKPD.                                                                                                                                        |
| 16 | Pergeseran RKA SKPD | Entitas yang memuat informasi pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama.                                                                                                                                                                                      |
| 17 | DPA SKPD            | Entitas Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah entitas yang berisi informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.                                                                |
| 18 | AKPD                | Entitas Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Daerah (AKPD) adalah entitas yang berisi informasi tentang perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. |
| 19 | SPD                 | Entitas Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah entitas yang berisi informasi tentang ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatan                                                                                                                                                            |

| No | Nama Entitas Data          | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | BKU Pendapatan             | Entitas Buku Kas Umum (BKU) Pendapatan adalah entitas yang berisi informasi tentang transaksi penerimaan pendapatan dan penyetoran pendapatan ke RKUD.                                                                       |
| 21 | SPJ Pendapatan             | Entitas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pendapatan adalah entitas yang berisi informasi tentang akumulasi realisasi pendapatan bulanan.                                                                                       |
| 22 | BKU Belanja                | Entitas Buku Kas Umum (BKU) Belanja adalah entitas yang berisi informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas pada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu baik tunai maupun non tunai.                   |
| 23 | SPJ Belanja                | Entitas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja adalah entitas yang berisi informasi tentang akumulasi realisasi belanja bulanan.                                                                                             |
| 24 | BKU Penerimaan Pembiayaan  | Entitas Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan Pembiayaan adalah entitas yang berisi informasi tentang penerimaan dan penyetoran dari transaksi Penerimaan Pembiayaan.                                                               |
| 25 | BKU Pengeluaran Pembiayaan | Entitas Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran Pembiayaan adalah entitas yang berisi informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dari transaksi Pengeluaran Pembiayaan pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.. |
| 26 | SPJ Penerimaan Pembiayaan  | Entitas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penerimaan Pembiayaan adalah entitas yang berisi informasi tentang akumulasi                                                                                                          |

| No | Nama Entitas Data          | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            | realisasi Penerimaan Pembiayaan bulanan.                                                                                                                                                                                          |
| 27 | SPJ Pengeluaran Pembiayaan | Entitas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Pembiayaan adalah entitas yang berisi informasi tentang akumulasi realisasi Pengeluaran Pembiayaan bulanan.                                                                    |
| 28 | Jurnal Pendapatan          | Entitas Jurnal Pendapatan adalah entitas yang berisikan informasi tentang catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang menghasilkan pendapatan daerah yang diterima oleh entitas.                         |
| 29 | Buku Besar Pendapatan      | Entitas Buku Besar Pendapatan adalah entitas yang berisikan informasi tentang catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang menghasilkan pendapatan daerah yang dikelompokkan berdasarkan akun pendapatan. |
| 30 | Jurnal Belanja             | Entitas Jurnal belanja adalah entitas yang berisikan informasi tentang catatan akuntansi yang mencatat semua pengeluaran belanja daerah yang dilakukan oleh entitas.                                                              |
| 31 | Buku Besar Belanja         | Entitas Buku Besar adalah entitas yang berisikan informasi tentang catatan akuntansi yang mencatat semua pengeluaran belanja daerah yang dikelompokkan berdasarkan akun belanja daerah.                                           |
| 32 | Jurnal Pembiayaan          | Entitas Jurnal Pembiayaan adalah entitas yang berisikan informasi tentang catatan akuntansi yang mencatat semua                                                                                                                   |

| No | Nama Entitas Data            | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              | transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33 | Buku Besar Pembiayaan        | Entitas Buku Besar Pembiayaan adalah entitas yang berisikan informasi tentang catatan akuntansi yang mencatat semua transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dikelompokkan berdasarkan akun pembiayaan.                                                                   |
| 34 | Neraca Saldo                 | Entitas Neraca Saldo entitas yang berisikan informasi tentang ringkasan dari semua akun dalam buku besar yang menunjukkan saldo masing-masing akun yang disiapkan pada akhir periode akuntansi, seperti akhir bulan atau akhir tahun, dan digunakan untuk menilai keuangan suatu entitas.        |
| 35 | Realisasi Anggaran Tahun n-1 | Entitas Realisasi Anggaran Tahun n-1 adalah entitas yang berisikan informasi tentang ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah tahun sebelumnya.                                                                                         |
| 36 | LRA                          | Entitas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah entitas yang berisikan informasi tentang ikhtisar realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. |
| 37 | LO                           | Entitas Laporan Operasional (LO) adalah entitas yang berisikan informasi tentang ikhtisar seluruh kegiatan operasional                                                                                                                                                                           |

| No | Nama Entitas Data | Deskripsi                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.                           |
| 38 | LP SAL            | Entitas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) adalah entitas yang berisikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.            |
| 39 | LPE               | Entitas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah entitas yang berisikan informasi tentang perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.                              |
| 40 | LAK               | Entitas Laporan Arus Kas (LAK) adalah entitas yang berisikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. |
| 41 | Neraca            | Entitas Neraca adalah entitas yang berisikan informasi tentang posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.                                                   |
| 42 | CALK              | Entitas Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah entitas yang berisikan tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang                                                             |

| No | Nama Entitas Data                      | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        | disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.                                                                                                                                                                                        |
| 43 | Hasil Reviu LKPD                       | Entitas Hasil Reviu LKPD adalah entitas yang berisikan tentang informasi hasil penelaahan ulang atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.                                                                                                                                          |
| 44 | LHP BPK                                | Entitas Laporan Hasil Pemeriksaan LHP adalah entitas yang berisikan tentang catatan-catatan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).                                                                      |
| 45 | LPPD                                   | Entitas Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) adalah entitas yang berisikan tentang informasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah hasil konsolidasi dari laporan-laporan dari entitas akuntansi, dan sudah melalui hasil reviu dan pemeriksaan oleh BPK. |
| 46 | Dokumen dan data dasar capaian kinerja | Dokumen data dasar yang mendukung capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah                                                                                                                                                                                             |
| 47 | LPPD                                   | Laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran                                                                           |
| 48 | LKPJ                                   | Laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan                                                                                                               |

| No | Nama Entitas Data                                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          | pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran                                                                                                                        |
| 49 | RLPPD                                                                    | Informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran                                                        |
| 50 | EPPD                                                                     | evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah                                   |
| 51 | Data dan dokumen pendukung capaian kinerja setiap Perangkat Daerah       | Data capaian kinerja dan dokumen pendukung yang membuktikan data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masing-masing Perangkat Daerah                                                                  |
| 52 | Data dan dokumen pendukung capaian kinerja dari seluruh Perangkat Daerah | Data capaian kinerja dan dokumen pendukung yang membuktikan data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah seluruh Perangkat Daerah                                                                             |
| 53 | Dokumen dan data capaian kinerja                                         | Dokumen dan data yang menggambarkan pencapaian kinerja pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya                                                                                  |
| 54 | Hasil verifikasi dan penilaian dokumen dan data dasar                    | dokumen hasil pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, data keuangan dan sebagainya, serta hasil penelusuran bukti suatu kegiatan yang memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan |

| No | Nama Entitas Data            | Deskripsi                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              | sesuai dengan ketentuan, standar, rencana dan norma yang telah ditetapkan                                                                                                                                               |
| 55 | LPPD Provinsi                | Laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran        |
| 56 | LPPD Kabupaten/<br>Kota      | Laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran |
| 57 | EPPD Provinsi                | evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka penilaian dan analisis kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah                                                         |
| 58 | EPPD Kabupaten/<br>Kota      | evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian dan analisis kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah                                                   |
| 59 | Hasil EPPD Provinsi          | Hasil EPPD Provinsi merupakan laporan hasil pengukuran kinerja pemerintahan provinsi yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan provinsi                         |
| 60 | Hasil EPPD<br>Kabupaten/Kota | Hasil EPPD Provinsi merupakan laporan hasil pengukuran kinerja pemerintahan                                                                                                                                             |

| No | Nama Entitas Data                          | Deskripsi                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | provinsi yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan provinsi                                           |
| 61 | Hasil EPPD                                 | Laporan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan daerah |
| 62 | Berita Acara penyampaian hasil EPPD        | Dokumen yang memuat bukti penyampaian hasil EPPD                                                                                                              |
| 63 | Dokumen tindak lanjut hasil penilaian EPPD | Dokumen yang memuat tindak lanjut hasil penilaian EPPD                                                                                                        |

B. Kode Referensi Data

Kodifikasi data perlu ditetapkan untuk tujuan integrasi data dan kemudahan pelacakan serta pengelolaan. Dalam kodifikasi data dibagi dalam dua bagian besar yaitu data transaksional atau data fungsional berdasarkan proses bisnis dan data referensi atau data induk yang mengacu pada data-data yang menjadi acuan pada penggunaan data-data fungsional. Berikut adalah Kodifikasi yang dilakukan:

1. Data Fungsional SIPD

Berdasarkan proses bisnis pada bagian sebelumnya kodifikasi data dimulai pada level 3 nasional atau level 1 di SIPD ini. Adapun lingkup pengkodean data fungsional ini dimulai dari 09.01.0X – 09.01.1X

- a. DAD28- 09.01.04 Informasi Pembangunan Daerah
- b. DAD28- 09.01.05 Informasi Keuangan Daerah
- c. DAD28- 09.01.06 Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

2. Data Referensi SIPD

Pada kodifikasi data referensi dimulai dari DAD28- 09.01.2X – DAD28 09.01.9X yang digunakan untuk entitas data non transaksional.

- a. DAD28- 09.01.21 Kementerian dan Lembaga
- b. DAD28- 09.01.21.XX digunakan untuk datum Kementerian dan Lembaga yang menjadi entitas pada level 4
- c. DAD28- 09.01.22 Pemerintah Daerah
- d. DAD28- 09.01.22.XX Provinsi: merupakan datum dari DAD28- 09.01.22 Pemerintah Daerah dan menjadi sub entitas
- e. DAD28- 09.01.22.XX.YY Kabupaten/Kota: merupakan datum dari sub entitas DAD28- 09.01.22.XX Provinsi
- f. DAD28- 09.01.23 Perangkat Daerah

Berikut Daftar Referensi Arsitektur Data SIPD

| No       | Data SIPD                                               | Referensi    |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 1        | [DAD28- 09.01] - Dalam Negeri                           | DAD28- 09.01 |
| 2        | [DAD28- 09.01.04] Informasi Pembangunan Daerah          | DAD28- 09.01 |
| 3        | [DAD28- 09.01.05] Informasi Keuangan Daerah             | DAD28- 09.01 |
| 4        | [DAD28- 09.01.06] Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya | DAD28- 09.01 |
| 5        | [DAD28- 09.01.04.01] RPJPD                              | DAD28- 09.01 |
| 6        | [DAD28- 09.01.04.02] RPJMD                              | DAD28- 09.01 |
| 7        | [DAD28- 09.01.04.03] RKPD                               | DAD28- 09.01 |
| 8        | [DAD28- 09.01.04.04] Renstra PD                         | DAD28- 09.01 |
| 9        | [DAD28- 09.01.04.05] Renja PD                           | DAD28- 09.01 |
| 10       | [DAD28- 09.01.05.01] APBD                               | DAD28- 09.01 |
| 11<br>12 | [DAD28- 09.01.05.02] Rancangan APBD                     | DAD28- 09.01 |
| 13       | [DAD28- 09.01.05.03] KUA                                | DAD28- 09.01 |
| 14       | [DAD28- 09.01.05.04] PPAS                               | DAD28- 09.01 |
| 15       | [DAD28- 09.01.05.05] RKA SKPD                           | DAD28- 09.01 |

|          |                                                                                               |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 16       | [DAD28- 09.01.05.06] Perubahan APBD                                                           | DAD28- 09.01 |
| 17       | [DAD28- 09.01.05.07] Rancangan Perubahan APBD                                                 | DAD28- 09.01 |
| 18       | [DAD28- 09.01.05.08] Perubahan KUA                                                            | DAD28- 09.01 |
| 19       | [DAD28- 09.01.05.09] Perubahan PPAS                                                           | DAD28- 09.01 |
| 20       | [DAD28- 09.01.05.10] Perubahan RKA SKPD                                                       | DAD28- 09.01 |
| 21       | [DAD28- 09.01.05.11] Pergeseran RKA SKPD                                                      | DAD28- 09.01 |
| 22       | [DAD28- 09.01.05.12] DPA SKPD                                                                 | DAD28- 09.01 |
| 23       | [DAD28- 09.01.05.13] AKPD                                                                     | DAD28- 09.01 |
| 24       | [DAD28- 09.01.05.14] SPD                                                                      | DAD28- 09.01 |
| 25       | [DAD28- 09.01.05.15] BKU Pendapatan                                                           | DAD28- 09.01 |
| 26       | [DAD28- 09.01.05.16] SPJ Pendapatan                                                           | DAD28- 09.01 |
| 27       | [DAD28- 09.01.05.17] BKU Belanja                                                              | DAD28- 09.01 |
| 28       | [DAD28- 09.01.05.18] SPJ Belanja                                                              | DAD28- 09.01 |
| 29<br>30 | [DAD28- 09.01.05.19] BKU Penerimaan<br>Pembiayaan                                             | DAD28- 09.01 |
| 31       | [DAD28- 09.01.05.20] BKU Pengeluaran<br>Pembiayaan                                            | DAD28- 09.01 |
| 32       | [DAD28- 09.01.05.21] SPJ Penerimaan<br>Pembiayaan                                             | DAD28- 09.01 |
| 33<br>34 | [DAD28- 09.01.05.22] SPJ Pengeluaran<br>Pembiayaan                                            | DAD28- 09.01 |
| 35       | [DAD28- 09.01.05.23] Jurnal Pendapatan                                                        | DAD28- 09.01 |
| 36<br>37 | [DAD28- 09.01.05.24] Buku Besar Pendapatan                                                    | DAD28- 09.01 |
| 38       | [DAD28- 09.01.05.25] Jurnal Belanja                                                           | DAD28- 09.01 |
| 39       | [DAD28- 09.01.05.26] Buku Besar Belanja                                                       | DAD28- 09.01 |
| 40<br>41 | [DAD28- 09.01.05.27] Jurnal Pembiayaan                                                        | DAD28- 09.01 |
| 42       | [DAD28- 09.01.05.28] Buku Besar Pembiayaan                                                    | DAD28- 09.01 |
| 43       | [DAD28- 09.01.05.29] Neraca Saldo                                                             | DAD28- 09.01 |
| 44       | [DAD28- 09.01.05.30] Realisasi Anggaran Tahun<br>n-1                                          | DAD28- 09.01 |
| 45       | [DAD28- 09.01.05.31] LRA                                                                      | DAD28- 09.01 |
| 46       | [DAD28- 09.01.05.32] LO                                                                       | DAD28- 09.01 |
| 47       | [DAD28- 09.01.05.33] LP SAL                                                                   | DAD28- 09.01 |
| 48       | [DAD28- 09.01.05.34] LPE                                                                      | DAD28- 09.01 |
| 49       | [DAD28- 09.01.05.35] LAK                                                                      | DAD28- 09.01 |
| 50       | [DAD28- 09.01.05.36] Neraca                                                                   | DAD28- 09.01 |
| 51       | [DAD28- 09.01.05.37] CALK                                                                     | DAD28- 09.01 |
| 52       | [DAD28- 09.01.06.01] Hasil Reviu LKPD                                                         | DAD28- 09.01 |
| 53       | [DAD28- 09.01.06.02] LHP BPK                                                                  | DAD28- 09.01 |
| 54       | [DAD28- 09.01.06.03] LPPD                                                                     | DAD28- 09.01 |
| 55       | [DAD28- 09.01.06.04] Dokumen dan data dasar<br>capaian kinerja                                | DAD28- 09.01 |
| 56       | [DAD28- 09.01.06.05] LPPD                                                                     | DAD28- 09.01 |
| 57       | [DAD28- 09.01.06.06] LKPJ                                                                     | DAD28- 09.01 |
| 58       | [DAD28- 09.01.06.07] RLPPD                                                                    | DAD28- 09.01 |
| 59       | [DAD28- 09.01.06.08] EPPD                                                                     | DAD28- 09.01 |
| 60       | [DAD28- 09.01.06.09] Data dan dokumen<br>pendukung capaian kinerja setiap Perangkat<br>Daerah | DAD28- 09.01 |

|    |                                                                                               |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 61 | [DAD28- 09.01.06.10] Data dan dokumen pendukung capaian kinerja dari seluruh Perangkat Daerah | DAD28- 09.01 |
| 62 | [DAD28- 09.01.06.11] Dokumen dan data capaian kinerja                                         | DAD28- 09.01 |
| 63 | [DAD28- 09.01.06.12] Hasil verifikasi dan penilaian dokumen dan data dasar                    | DAD28- 09.01 |
| 64 | [DAD28- 09.01.06.13] LPPD Provinsi                                                            | DAD28- 09.01 |
| 65 | [DAD28- 09.01.06.14] LPPD Kabupaten/ Kota                                                     | DAD28- 09.01 |
| 66 | [DAD28- 09.01.06.15] EPPD Provinsi                                                            | DAD28- 09.01 |
| 67 | [DAD28- 09.01.06.16] EPPD Kabupaten/ Kota                                                     | DAD28- 09.01 |
| 68 | [DAD28- 09.01.06.17] Hasil EPPD Provinsi                                                      | DAD28- 09.01 |
| 69 | [DAD28- 09.01.06.18] Hasil EPPD Kabupaten/ Kota                                               | DAD28- 09.01 |
| 70 | [DAD28- 09.01.06.19] Hasil EPPD                                                               | DAD28- 09.01 |
| 71 | [DAD28- 09.01.06.20] Berita Acara penyampaian hasil EPPD                                      | DAD28- 09.01 |
| 72 | [DAD28- 09.01.06.21] Dokumen tindak lanjut hasil penilaian EPPD                               | DAD28- 09.01 |

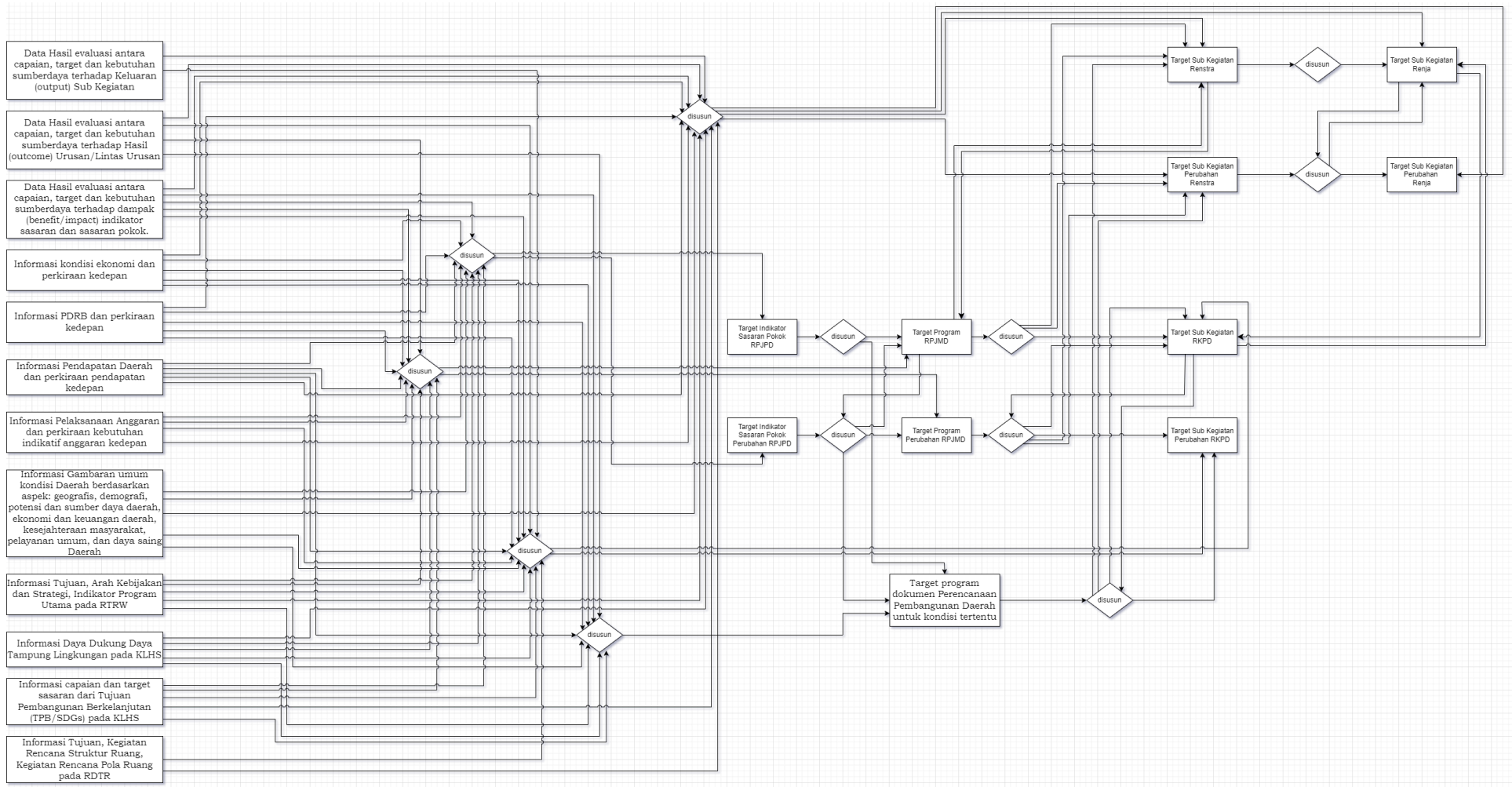
### C. Matriks Relasi Antar Entitas Data

[illegible]

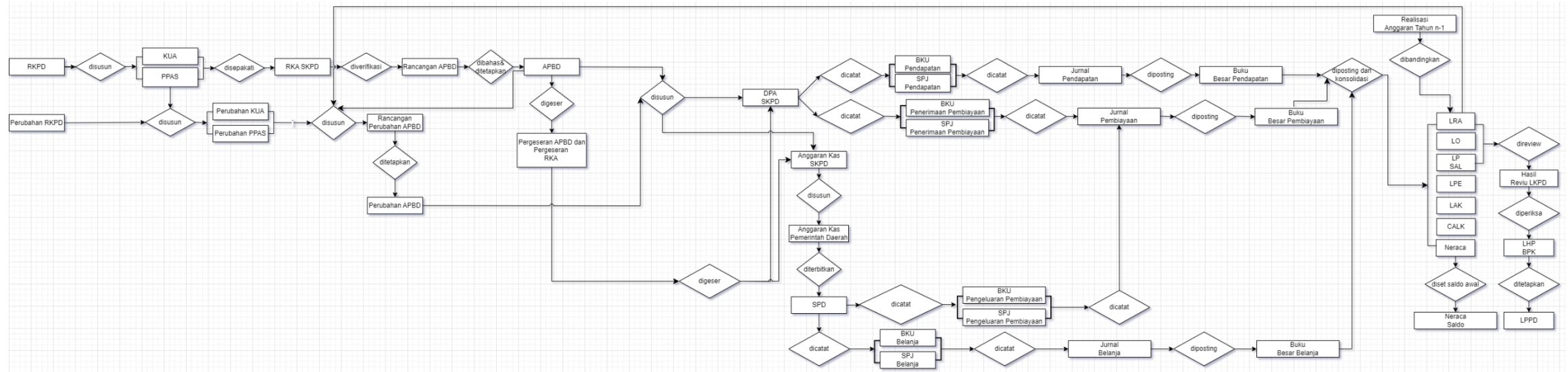
D. Diagram Relasi Antar Entitas Data

Pada bagian ini digambarkan relasi antar entitas secara konseptual berdasarkan identifikasi dari daftar entitas data di atas:

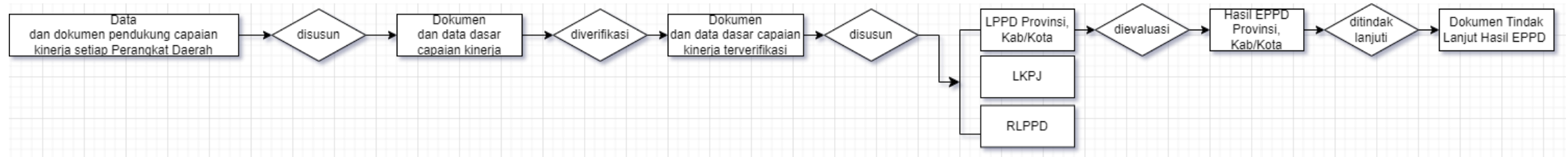
1) Diagram Relasi Informasi Pembangunan Daerah



## 2) Diagram Relasi Informasi Keuangan Daerah



3) Diagram Relasi Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya



## BAB V

### PERSYARATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Persyaratan teknologi informasi dan komunikasi pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah merupakan deskripsi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi syarat pemenuhan terhadap Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam penyediaan infrastruktur dan pembangunan/pengembangan Aplikasi Umum Pemerintahan Daerah ataupun aplikasi sejenis. Persyaratan teknologi informasi dan komunikasi Aplikasi Umum Pemerintahan Daerah mencakup Persyaratan Umum, Persyaratan Teknis, Persyaratan Pelayanan Aplikasi Umum, dan Persyaratan Manajemen SPBE.

#### A. Persyaratan Umum

1. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dapat diakses melalui teknologi berbasis jejaring (*web*) yang bersifat responsif maupun melalui piranti bergerak (*mobile*)
2. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menjadi milik Negara.
3. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi Umum.
4. Penerapan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah mematuhi kebijakan, peraturan, dan/atau standar yang terkait dengan:
  - a. manajemen risiko Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen layanan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah;
  - d. manajemen perubahan;
  - e. manajemen aset TIK
  - f. manajemen sumber daya Manusia
  - g. manajemen pengetahuan
  - h. manajemen data
  - i. audit TIK dan Keamanan
  - j. infrastruktur Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah yang mencakup pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah.
5. Kerangka kerja (*framework*) pembangunan/pengembangan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah mengacu pada kerangka kerja dalam Arsitektur SPBE Nasional.

#### B. Persyaratan Teknis

1. Penggunaan Infrastruktur

- a. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah ditempatkan dan dijalankan di Pusat Data Kementerian Dalam Negeri dan akan ditempatkan secara bertahap di Pusat Data Nasional. Strategi tahapan migrasi dalam pemanfaatan Pusat Data Nasional dituangkan dalam Standar Teknis Persyaratan Teknologi Informasi dan Komunikasi Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah.
  - b. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dapat diakses dalam waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (24/7) dengan tingkat ketersediaan 99,99% dalam setahun.
  - c. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menjalankan prinsip ketersediaan tingkat tinggi (*High Availability*).
  - d. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memiliki sumber daya komputasi dan jaringan yang memadai.
  - e. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memiliki alokasi media penyimpanan (*storage*) yang cukup.
  - f. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memiliki Keandalan Toleransi Kegagalan (*Fault Tolerance*) di sumber daya penyimpanan (*storage*), komputasi dan transmisi jaringan yang cukup
  - g. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dijalankan pada platform yang menjamin keandalan tinggi.
  - h. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memiliki sistem cadangan (*backup system*) minimal *Active Passive*.
  - i. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah diakses melalui Jaringan Intra Pemerintah untuk akses data dan/atau proses yang memerlukan tingkat keamanan yang tinggi dan/atau dapat diakses melalui Jaringan Publik pada umumnya.
  - j. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dibangun dengan arsitektur *microservices (cloud native)* dalam Platform Kontainer (*Container Platform*).
  - k. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dapat memiliki fasilitas Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk interoperabilitas layanan.
2. Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Umum
    - a. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dirancang dengan memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data (*Capacity Planning*).
    - b. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dirancang dengan komponen-komponen yang bersifat modular pada data, logika komputasi, dan antarmuka.
    - c. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah terdiri dari komponen umum aplikasi dan komponen khusus aplikasi.

- d. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dibangun/dikembangkan dengan mengutamakan penggunaan teknologi kode sumber terbuka.
  - e. Penggunaan teknologi kode sumber terbuka pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah mempertimbangkan keandalan, performa, keberlangsungan, dan keamanan.
  - f. Penggunaan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memastikan penerapan versi terkini.
  - g. Perubahan kode sumber dicatat dalam arsip rekam jejak untuk menjaga keterlacakan.
  - h. Lisensi yang digunakan pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis namun tetap memperhatikan pertimbangan biaya dan manfaat.
  - i. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memperhatikan pengembangan dan integrasi secara berkelanjutan.
  - j. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah yang dibangun/dikembangkan oleh pihak ketiga baik sebagian maupun keseluruhan memiliki perjanjian (kontrak) yang menjamin terjaganya keamanan data, keamanan aplikasi, kesesuaian lisensi, transfer pengetahuan dan teknologi, dan serah terima dokumentasi secara lengkap.
3. Penerapan Interoperabilitas
- a. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memiliki fasilitas interoperabilitas melalui antarmuka pemrograman aplikasi (*Application Programming Interface*) untuk integrasi layanan.
  - b. Interoperabilitas layanan dan data pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dengan aplikasi lain di internal Kementerian Dalam Negeri menggunakan fasilitas Sistem Penghubung Layanan Instansi (SPLI).
  - c. Interoperabilitas layanan dan data pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dengan aplikasi Kementerian/Lembaga/Instansi lain menggunakan fasilitas Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
  - d. Interoperabilitas layanan dan data pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memiliki skema data/metadada yang mencakup format data, pemeriksaan kesalahan, dan catatan jejak aktivitas.
4. Uji Coba Aplikasi Umum
- a. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilakukan uji fungsi, uji integrasi, uji beban, dan uji keamanan.

- b. Pengujian Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Lembaga Negara yang menaungi urusan Keamanan maupun Teknologi Informasi.
  - c. Pengujian Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilakukan dengan platform, perangkat, dan kecepatan koneksi data yang berbeda.
5. Dokumentasi Aplikasi Umum
- Dokumentasi Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah mencakup:
- a. dokumentasi sistem yang terdiri atas:
    - 1) dokumentasi analisis kebutuhan;
    - 2) dokumentasi perencanaan;
    - 3) dokumentasi arsitektur;
    - 4) dokumentasi desain proses bisnis;
    - 5) dokumentasi desain data;
    - 6) dokumentasi desain keamanan;
    - 7) dokumentasi kode sumber;
    - 8) dokumentasi implementasi;
    - 9) dokumentasi hasil uji kelayakan;
    - 10) dokumentasi pemeliharaan; dan
    - 11) dokumentasi evaluasi.
  - b. dokumentasi pengguna yang terdiri atas:
    - 1) dokumentasi panduan pengguna; dan
    - 2) dokumentasi Soal Sering Ditanya (*Frequently Asked Questions*).

### C. Persyaratan Pelayanan Aplikasi Umum

- 1. Pelayanan Pengguna
  - a. Pelayanan pengguna untuk bantuan proses bisnis Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilakukan oleh instansi pemilik proses bisnis dari Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah.
  - b. Pelayanan pengguna untuk bantuan teknis Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilakukan oleh instansi pemilik proses bisnis dari Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk.
  - c. Pelayanan pengguna untuk bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah disediakan dalam bentuk layanan bantuan (*helpdesk*).
  - d. *Helpdesk* untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menyediakan Soal Sering Ditanya (*Frequently Asked Questions*).
  - e. *Helpdesk* untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menyediakan berbagai pilihan saluran sesuai dengan persyaratan pengguna.

- f. *Helpdesk* untuk layanan bantuan bisnis dan teknis dapat diakses dalam waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (24/7) dengan tingkat ketersediaan 99,99% dalam setahun.

2. Pengoperasian Aplikasi Umum

- a. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilakukan perawatan oleh instansi pemilik proses bisnis.
- b. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilakukan perawatan terhadap:
  - 1) perbaikan kesalahan aplikasi;
  - 2) perubahan persyaratan proses bisnis;
  - 3) perubahan persyaratan data;
  - 4) perubahan teknologi pendukung; atau
  - 5) peningkatan keamanan;
- c. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilakukan penyalinan (*backup*) data secara berkala.
- d. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilakukan audit TIK secara berkala.

D. Persyaratan Manajemen SPBE

Persyaratan Manajemen SPBE meliputi:

1. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko SPBE diterapkan pada pembangunan, pengembangan, dan manajemen layanan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah.

2. Manajemen Layanan Aplikasi Umum

Manajemen layanan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah didukung dengan rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*).

3. Manajemen Perubahan SPBE

Manajemen Perubahan diterapkan terhadap perubahan persyaratan pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah.

BAB VI  
PERSYARATAN KEAMANAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Persyaratan keamanan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah merupakan deskripsi dari syarat keamanan yang harus dipenuhi oleh Aplikasi Umum Bidang Pemerintah Daerah. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam upaya melakukan pengamanan pada infrastruktur dan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah. Persyaratan keamanan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah mencakup persyaratan perlindungan data dan informasi, keamanan aplikasi, serta keamanan infrastruktur dan jaringan.

A. Persyaratan Keamanan Berbasis Web

1. Autentikasi

- a. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan manajemen kata sandi (*password*) untuk proses autentikasi. Autentikasi tersebut merupakan Modul Aplikasi tersendiri (*independent*).
- b. Manajemen kata sandi diterapkan pada sisi server.
- c. Manajemen kata sandi mengatur:
  - 1) Penggunaan jumlah karakter dan kombinasi jenis karakter (huruf kecil, huruf besar, bilangan, dan/atau karakter khusus);
  - 2) Penerapan waktu tunda autentikasi ketika mencapai jumlah maksimum kesalahan dalam memasukkan kata sandi;
  - 3) Mekanisme Kadaluarsa Sandi (*Password Aging*);
  - 4) Mekanisme pemulihan kata sandi; dan
  - 5) Kerahasiaan kata sandi yang disimpan melalui mekanisme kriptografi searah (*hashing*).
- d. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan proses autentikasi melalui jalur komunikasi yang diamankan.

2. Manajemen Sesi

- a. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menggunakan manajemen sesi untuk pengendalian kenirsangkalan sesi aplikasi.
- b. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah tidak mengijinkan penggunaan sesi pengguna duplikat secara bersamaan, yang berasal dari mesin yang berbeda.
- c. Manajemen sesi mengatur :
  - 1) Jangka waktu sesi dan kondisi keberlakuan sesi;
  - 2) Pembuatan dan keacakan token sesi yang dihasilkan oleh pengendali sistem;
  - 3) Validasi dan pencantuman identitas sesi/ *session* ID; dan

- 4) Penggunaan sesi terenkripsi.
3. Kontrol Akses
  - a. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memiliki mekanisme pengendalian akses pengguna terhadap sumber daya, halaman (*page*), dan aktivitas.
  - b. Direktori server web untuk Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilakukan pengamanan agar terhindar dari tindakan penelusuran (*listing/browsing*) oleh pengguna.
  - c. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah mampu mendeteksi dan memberikan peringatan atau notifikasi terhadap pengaksesan sumber daya yang tidak wajar.
  - d. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memiliki mekanisme verifikasi yang direkomendasikan ketika mengakses data sensitif.
4. Validasi Input
  - a. Lingkungan eksekusi program (*runtime environment*) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memiliki keandalan terhadap kegagalan sistem dan serangan keamanan.
  - b. Seluruh masukan (*input*) pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilakukan validasi melalui mekanisme:
    - 1) Fungsi validasi yang diterapkan pada sisi server dan dapat diterapkan pada sisi klien;
    - 2) Penggunaan validasi positif; dan
    - 3) Penolakan kesalahan validasi.
  - c. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah mampu melakukan filter terhadap data yang mengandung kode penyusupan/intrusi.
  - d. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah terlindungi dari serangan keamanan berupa injeksi skrip dan inklusi file.
5. Mekanisme Kriptografi
  - a. Seluruh data dan informasi yang termasuk dalam klasifikasi sensitif pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah disimpan dalam keadaan terenkripsi.
  - b. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menggunakan algoritma, modul, protokol, dan kunci kriptografi yang tersertifikasi dan ditetapkan oleh pemerintah.
  - c. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah wajib menerapkan manajemen kerahasiaan untuk mengamankan pembuatan, penyimpanan, kontrol akses, serta penghancuran rahasia terhadap data dan informasi sensitif.

6. Pencatatan Aktivitas (Log)

- a. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah melakukan pencatatan atas seluruh aktivitas pengguna dan aktivitas sistem aplikasi ke dalam catatan aktivitas di semua level pengguna.
- b. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menggunakan mekanisme perlindungan dari akses dan modifikasi yang tidak sah terhadap catatan aktivitas.
- c. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menggunakan sumber waktu dari server zona waktu yang telah ditetapkan.

7. Penanganan Kesalahan

- a. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan penanganan kesalahan (*exception handling*) untuk kesalahan yang terprediksi maupun yang tidak terprediksi.
- b. Penanganan kesalahan pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menampilkan pesan kesalahan secara umum (tanpa informasi teknis yang spesifik).
- c. Pesan kesalahan pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah yang disebabkan oleh kesalahan/kegagalan sistem atau aplikasi dapat dikirimkan ke administrator.

8. Proteksi Data

- a. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah melindungi data sensitif dan salinannya dari penyimpanan dan pengaksesan yang tidak sah.
- b. Data sensitif Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah tidak disimpan secara persisten maupun permanen pada sisi klien.
- c. Pencadangan data Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilakukan secara berkala.
- d. Cadangan (*backup*) data Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah disimpan di tempat yang aman.
- e. Arsitektur Data file maupun Database Aplikasi menerapkan prinsip Redundansi Komponen Penyimpanan.
- f. Uji coba simulasi kerusakan dan pemulihan data Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilakukan secara berkala.
- g. Pengaksesan data sensitif dicatat dalam catatan aktivitas untuk keperluan audit.
- h. Data sensitif pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah yang disimpan dalam database pada sisi server dilakukan penghapusan sesuai dengan klasifikasi dan masa retensinya.

## 9. Keamanan Komunikasi

- a. Autentikasi, koneksi, dan komunikasi antara server dan klien pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilakukan pengamanan pada saluran komunikasi dengan menggunakan protokol enkripsi yang terkini.
- b. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan komunikasi API yang terenkripsi.
- c. Pengamanan saluran komunikasi untuk proses autentikasi, koneksi, dan komunikasi antara server dan klien pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah diutamakan menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik pemerintah atau menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik lain yang andal dan terpercaya.
- d. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan jalur komunikasi yang aman dalam proses pentransmisian data.

## 10. Kontrol Kode Berbahaya (*Malicious Code*)

Pengendalian kode berbahaya pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dapat dilakukan dengan mendeteksi/menganalisis kode sumber yang digunakan termasuk kode sumber dari pihak ketiga pada saat pengembangan dan/atau operasional.

## 11. Logika Bisnis (*Business Logic*)

Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memiliki pengendalian untuk mencegah alur logika bisnis yang tidak sesuai dengan urutan langkah proses yang benar, tidak sesuai dengan waktu yang wajar, atau tidak memenuhi aturan validasi dari setiap langkah proses.

## 12. Berkas (*File*)

- a. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah membatasi jenis ekstensi, jumlah, dan ukuran berkas yang diunggah/diunduh oleh pengguna.
- b. Berkas yang diunggah/diunduh oleh pengguna pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilakukan validasi tipe konten dan dipindai oleh pemindai antivirus. Pemindaian dilakukan oleh anti virus server pada saat file diunggah ke dalam Aplikasi di latar belakang proses.
- c. Berkas pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilindungi dari pengaksesan yang tidak sah.
- d. Berkas pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan tanda tangan elektronik bersertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik pemerintah.

- e. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan Pemindaian antivirus terhadap berkas yang disimpan di Server secara berkala.
13. Keamanan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (*Application Programming Interface*) dan Layanan Berbasis Web (*Web Service*)
- a. Layanan berbasis web yang digunakan pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilakukan konfigurasi untuk melindungi antarmuka pemrograman aplikasi dari pengaksesan yang tidak sah.
  - b. Layanan antarmuka pemrograman aplikasi yang digunakan pada Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memiliki pengendalian untuk mencegah pengaksesan yang terus-menerus dalam kurun waktu tertentu dan tidak wajar.
  - c. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dalam penggunaan antarmuka pemrograman aplikasi melindungi informasi sensitif sesuai dengan mekanisme pengamanan antarmuka pemrograman aplikasi.
  - d. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah melakukan validasi dan verifikasi berdasarkan skema terhadap hasil yang diterima dari fungsi antarmuka pemrograman aplikasi.
14. Keamanan Konfigurasi
- a. Infrastruktur pendukung Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dikonfigurasi dengan mengutamakan prinsip keamanan.
  - b. Konfigurasi server Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah disesuaikan dengan spesifikasi server aplikasi dan kerangka kerja aplikasi (*framework*) yang ditetapkan.
  - c. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan pendokumentasian pembaruan dan atau perubahan konfigurasi serta pengecekan terhadap standar konfigurasi secara berkala.
15. Kontrol Keamanan Tahap Pengembangan
- a. Pengembangan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan prinsip *Secure Software Development Life Cycle* (SSDLC).
  - b. Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan prinsip keamanan pada tahapan perencanaan, analisis kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian hingga ke lingkungan *Production*.
  - c. Pengembangan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dilakukan di jaringan tertutup.

## 16. Mekanisme Pengecekan Integritas Data

Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan fungsi pengecekan integritas data baik data yang tersimpan maupun data yang berproses.

### B. Persyaratan Keamanan Aplikasi Berbasis Mobile

#### 1. Penyimpanan data dan persyaratan privasi.

- a) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah melindungi data dan informasi di perangkat pengguna;
- b) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menyimpan informasi yang dikecualikan hanya dalam fasilitas penyimpanan kredensial;
- c) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menonaktifkan *cache keyboard* pada saat memasukkan data dan informasi yang dikecualikan;
- d) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah melindungi informasi yang dikecualikan saat terjadi *inter process communication*; dan
- e) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah melindungi data dan informasi yang dikecualikan yang dimasukkan melalui antarmuka pengguna.

#### 2. Kriptografi pada aplikasi mobile

- a) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menggunakan mekanisme kriptografi untuk melindungi data dan informasi;
- b) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menggunakan dan mengimplementasikan metode kriptografi berdasarkan pertimbangan tingkat keamanan dan kebutuhan;
- c) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan manajemen kunci;
- d) Kunci enkripsi dibangkitkan menggunakan pembangkit angka acak kriptografi (CRNG).

#### 3. Autentikasi dan manajemen sesi

- a) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan pengaturan sandi pada *Remote Endpoint*;
- b) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memastikan hanya perangkat ter-Autentikasi yang dapat terkoneksi ke *remote endpoint*;
- c) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan manajemen sesi;
- d) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dalam hal penggunaan *statefull session* menggunakan *session identifier* yang acak tanpa perlu mengirimkan kredensial pengguna;
- e) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah dalam hal penggunaan *stateless session* menyediakan token yang telah

ditandatangani menggunakan algoritme yang aman;

- f) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memastikan *remote endpoint* memutus sesi pada saat *log out*;
- g) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah membatasi jumlah percobaan *log in* pada *remote endpoint*;
- h) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menentukan masa berlaku sesi dan masa kedaluwarsa token pada *remote endpoint* dan otorisasi *Endpoint*.

#### 4. Komunikasi Jaringan Aplikasi *Mobile*

- a) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan *secure socket layer* atau *transport layer security* versi terkini;
- b) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan penggunaan sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi pemerintah atau menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik lain yang andal dan terpercaya.

#### 5. Interaksi platform

- a) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah hanya menggunakan akses sumber daya yang diperlukan;
- b) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah melakukan validasi terhadap seluruh input dari sumber eksternal dan pengguna;
- c) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menghindari penggunaan JavaScript dalam *WebView*;
- d) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah mengimplementasikan penggunaan serialisasi API yang aman.

#### 6. *Build Quality* Aplikasi *Mobile*

- a) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memerlukan proses penandatanganan aplikasi dengan sertifikat yang valid;
- b) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memastikan versi *build* yang digunakan adalah tahap *Production*;
- c) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan identifikasi kelemahan / kerentanan seluruh komponen *thirdparty*;
- d) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan penanganan *error*.

#### 7. Ketahanan Aplikasi *Mobile*

- a) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah mencegah aplikasi berjalan pada perangkat yang telah dilakukan modifikasi secara tidak sah;
- b) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah mendeteksi dan merespons *debugger*, *Reverse Engineering* serta mencegah *executable file* melakukan perubahan pada sumber daya perangkat;

- c) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah memastikan aplikasi tidak dapat berjalan di perangkat emulator;
- d) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah mendeteksi perubahan kode dan data di ruang memori;
- e) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah menerapkan fungsi *device binding* dengan menggunakan *property* unik pada perangkat;
- f) Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah melindungi seluruh *file* dan *library* pada aplikasi; dan menerapkan metode *obfuscation*.

## BAB V

### PENUTUP

Persyaratan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah diharapkan digunakan sebagai pedoman pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, dan penerapan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Kunci sukses penerapan aplikasi umum tersebut terletak pada peran serta dan kolaborasi yang kuat seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal di Pemerintah Daerah serta integrasi Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah.

Penggunaan Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah akan memberikan dampak efisiensi anggaran yang signifikan dimana tidak diperlukan lagi pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis. Disamping itu, penerapan Aplikasi Umum Pemerintahan Daerah memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam hal kecepatan, transparansi, dan bagi pakai data dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah.

Demikian, Aplikasi Umum Pemerintahan Daerah ini ditetapkan agar setiap Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi umum tersebut dalam Pemerintahan Daerah di lingkungannya masing-masing.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS